Bulletin

VOL 2 NOMOR 15 | MEI 2021

islamina

Rujukan Islam Indonesia

Arah Pendidikan Nasional: Antara Sekuler atau Islamis

"Sufisme Pendidikan Islam: Antara Sekuler atau Islamis?"

DAFTAR ISI

Dari Redaksi

SUSUNAN REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Hatim Gazali
Redaksi: Afif Sholeh, Khoirul Anwar, Syahril Mubarok, Ronald Gunawan
Administrasi: Rizki Dianti
Desain/Layout: wahah.studio
Email: redaksi@islamina.id
Alamat Redaksi: Jl. Jatimakmur Blok E No25 RT001/RW003 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Jawa Barat 17413
No Telp: 087887634552

Pertama-tama, redaksi Islamina mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri; Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi penghantar peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Swt, sehingga dengan iman dan takwa tersebut dapat menjadi bekal dalam membangun Indonesia, dan mendapatkan ridha Allah Swt.

Edisi kali ini, Islamina mengangkat tema tentang pelajaran agama Islam, sebuah topik yang sebenarnya bukan baru, namun sering kali menjadi persoalan dan kontroversi, terutama di kalangan umat Islam. Ini terutama, belakangan ini, muncul sejumlah kontroversi baru terkait dengan pelajaran agama Islam di sekolah dasar.

Karena itu, rubrik Kajian Islamina Vol 2 No 15 pada mengangkat tema Islam sebagai mata pelajaran; antara dogmatik atau etik. Islamina juga melakukan wawancara Prof. Dr. H. Armai Arief, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia. Tulisan dari Mustafied, Barmawi, Muhammadun melengkapi para pembaca untuk memotret soal pendidikan agama Islam. Rubrik Hikmah dan Istilah memungkasi edisi ini.

Akhir kata, selamat membaca. Islamina menerima tulisan dari para pembaca semua terkait dengan isu-isu keislaman yang moderat, *rahmatan lil alamin*.

Editorial

Mendayung Di Antara Dua Kutub

Berbeda dengan negara sekuler ataupun teokrasi, Indonesia menempatkan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Indikasinya jelas termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 "atas berkat rahmat Allah", dan sila pertama Pancasila. Karena itu, memperjuangkan agama sebagai ideologi negara sama konyolnya dengan mengenyahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama yang paling banyak diyakini warga Indonesia tak boleh menjadi dasar negara. Sebaliknya, mengesampingkan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara juga tak tepat.

Lalu, bagaimana dengan pendidikan agama, khususnya Islam? Pendidikan nasional tak boleh mengenyahkan nilai-nilai Islam. Karena itu, frase "bertuhan, beriman, bertakwa" harus tetap ada. Persoalannya, bagaimana Islam dihadirkan atau mewujud dalam pendidikan nasional. Dimensi apa dari Islam yang perlu menjadi inspirasi pendidikan nasional?

Semua umat Islam setuju bahwa tujuan hadirnya Islam ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak, moral dan etika. Keberimanan dan ketakwaan kepada Allah tak cukup hanya bertalian dengan relasi personal muslim dengan Allah. Ia juga--terutama--harus mewujud dalam kehidupan sehari-hari, berupa akhlak. Dengan cara ini, maka akhlak bisa menjadi salah satu parameter iman dan takwa kepada Allah.

Jika demikian, pelajaran Islam di sekolah harus berorientasi pada pembentukan akhlak. Dalam kerangka ini, pada sekolah negeri, ajaran-ajaran Islam terkait dengan teologi, fikih, sejarah tetap perlu diajarkan, tetapi dalam kerangka pembentukan akhlak tersebut. Dengan menjadikan pembentukan akhlak sebagai kerangka dasarnya, maka pelajaran Islam akan melahirkan *output* pelajar muslim yang tak hanya bermoral dengan sesama, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Melalui cara inilah, kekhawatiran ataupun temuan bahwa pelajaran Islam berkontribusi terhadap gagasan radikalisme bisa dibantah. Topik jihad, misalnya, bukan dipahami sebagai perang melawan orang yang berbeda, sebaliknya, jihad dipahami sebagai bela negara, jihad menjaga kerukunan dan perdamaian.

Alhasil, Islam menjadi penopang, bahkan inspirator kemajuan peradaban Indonesia. Kita perlu belajar banyak bagaimana Islam hadir sebagai inspirasi sehingga melahirkan banyak tokoh yang berkontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Tersebutlah misalnya Al-Kindi (188-260 H), Al-Farabi (258-339 H), Ibn Haitam (354-430), Ibn Sina (370-428H), al-Ghazali (450-505H), Ibn Rusyd (520-595H), dan lain sebagainya. Mereka tak hanya menekuni bidang keislaman, tetapi juga filsafat, matematika, optik, fisika, kedokteran, astronomi. Ke arah itulah, pendidikan Islam harus menuju.

Kajian

Arah Kebijakan PAI: Antara Dogmatik atau Etik?

Kajian Kebijakan & Tujuan PAI sampai pada Rekomendasi

Oleh: Hatim Gazali & Khoirul Anwar Afa

"Frasa agama hilang dalam peta jalan", demikian berita yang sempat heboh sebagai respons atas beredarnya sebuah file yang berjudul Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Dalam file yang beredar tersebut tertulis bulan Mei 2020. Namun, kehebohan itu baru muncul di akhir Februari 2021. Sebelumnya, pada 28 Januari 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyampaikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Komisi X, dengan judul Perkembangan Penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035.

Jika publik menyoroti soal "frasa agama yang hilang", yang lebih substansial untuk ditanyakan adalah apa pentingnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan Indonesia? Jika hal tersebut dianggap penting, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana agama mesti "mewujud" dalam pendidikan Indonesia? Apakah agama dihadirkan sebagai "stempel" bahwa pendidikan Indonesia sudah *legitimate* secara agama ataukah agama harus hadir sebagai ruh yang menghidupi pendidikan Indonesia? Jika sebagai ruh, apakah ia harus tampil kasat mata seperti kontroversi soal hilangnya frasa agama dalam peta jalan tersebut?

Di kesempatan lain, pernah juga heboh soal mata pelajaran agama, khususnya Islam, mulai dari buku teks pelajaran seperti terkait dengan narasi jihad dan khilafah, sampai pada kekhawatiran sebagian orang bahwa pendidikan agama berkontribusi terhadap radikalisme, intoleransi dan perpecahan di tengah masyarakat yang berbineka. Karena itu, berulang kali muncul isu "penghapusan pendidikan agama" di sekolah. Sebagai gantinya adalah pendidikan budi pekerti.

PELAJARAN AGAMA DARI ERA KOLONIAL SAMPAI REFORMASI

Perdebatan-perdebatan semacam ini bukan kali pertama muncul di tanah air. Jauh sebelum Indonesia merdeka, hal ihwal tentang bagaimana pendidikan agama diajarkan berulang kali menjadi perbincangan publik. Upaya untuk memasukkan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional sudah dibicarakan pada masa kolonial Belanda. Namun, pemerintahan Hindia Belanda menolak pendidikan agama--termasuk PAI-- masuk ke dalam sistem pendidikan dengan alasan pendidikan harus bersifat netral. Sikap pemerintah Hindia Belanda tersebut tercermin dalam *Indische Staatsregeling* (Konstitusi Hindia Belanda) pasal 179 (2) yang

berbunyi "pengajaran umum (*openbaar onderwijs*) adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar sekolah" (Kosim, 2014).

Namun pada praktiknya, pemerintahan Belanda tidak sepenuhnya netral, ia lebih berpihak kepada agama Kristen. Sejumlah sekolah Kristen didirikan di setiap keresidenan serta dianggap sekolah pemerintah dan mendapatkan subsidi secara rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen (Noer, 1998). Belanda pun menerbitkan Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Di tahun 1932, Belanda juga mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah (Rahim, 2001).

menaruh perhatian pada pesantren sebagai sistem pendidikan lokal. Namun karena di era itu juga berdiri sekolah-sekolah Missionaris yang lebih mirip dengan sistem pendidikan Barat yang dianggap lebih modern, sehingga pemerintah dominan mengadopsi sekolah Missionaris untuk diterapkan di sekolah-sekolah lokal. Dengan demikian, secara tidak langsung pendidikan pesantren maupun pendidikan sekolah Missionaris yang dijadikan sebagai sekolah lokal harus mengurangi mata pelajaran agama dan memasukkan mata pelajaran umum sesuai konsep pemerintah. Sehingga sekolah-sekolah yang diadopsi oleh pemerintah yang diberi sebutan *Sekolah Desa* itu mulai terbebas dari pelajaran agama dan menjadi sekuler (Sarno 2019).

Bagi pendidikan Islam sendiri itupun masih menyisakan duka yang panjang. Beberapa sumber sejarah menyebut bahwa disahkannya pendidikan Islam lokal sebagai pendidikan alternatif atau semacam sebagai pengganti sekolah formal, karena sistem yang diterapkan dianggap lebih jelek baik dari segi lembaga, metode maupun pengajaran (Sarno 2019). Pendidikan pesantren juga dipropagandakan sebagai pendidikan masyarakat rendahan yang secara ketat perlu diawasi (Suminto 1994).

Kebijakan Pendidikan Islam di Era Kolonial

- Dikotomi lembaga pendidikan; antara pendidikan Belanda dan Pendidikan Islam
- Pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah-sekolah umum (sekolah Belanda), Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah

- Ordonansi Sekolah Liar: penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah. Ini juga menjadi alasan untuk menutup kegiatan pendidikan, yang berdampak terhadap tumbuhnya madrasah.
- Pesantren menjadi icon perlawanan terhadap sistem pendidikan Belanda.

1882: pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam

1932 M: keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah

- 1905: Ordonansi Guru, setiap guru agama Islam yang akan mengajar wajib mendapatkan izin
- 1925: Ordonansi Guru, menyebutkan bahwa setiap guru agama wajib memberi tahu (bukan meminta izin).

Mulkan, dkk (1994) mencatat, di era gubernur jenderal Hindia Belanda, Fort Van der Capellen pada tahun 1819 M ketika mewujudkan terselenggaranya pendidikan untuk pribumi, Capellen semula lebih

Meskipun dasarnya, memang terjadi perbedaan orientasi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pendidikan pesantren maupun missionaris.

Pendidikan pemerintah lebih bertujuan untuk mendesain lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan. Sedangkan pendidikan pesantren dan missionaris lebih berorientasi mencetak lulusan yang memiliki keahlian di bidang agama. Orientasi yang tidak jauh berbeda juga diterapkan di era kemerdekaan, bahwa sekolah lebih bertujuan mencetak lulusan yang siap kerja.

Sampai pada menjelang kemerdekaan, diskursus pada konteks pendidikan nasional tidak hanya terbatas pada pilihan model dan sistem, tetapi juga pada tataran ideologi. Maksum mencatat bahwa ideologi yang bertarung saat itu dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama,* humanis sosial sekuler. *Kedua,* nasionalisme sekuler. Dan *ketiga,* humanisme religius. Maksum juga menyimpulkan bahwa ideologi yang pertama sangat bertentangan dengan konsep pendidikan Islam di pesantren, sedangkan kedua masih ketemu dan bahkan mendukung untuk sebagian merujuk pada sistem yang digunakan pesantren. Namun dengan adanya pasal 29, 31, dan 32 dalam UUD 1945 menggambarkan kompromi semua itu (Maksum 1999).

Kurikulum Pendidikan Agama di Era Orde Lama

Kurikulum 1947
- Baru diimplementasikan pada tahun 1950
- Keberadaan Pendidikan Agama Islam diatur dalam SKB PP & K dan Menteri Agama tahun 1946
- Coraknya masih kental sistem pendidikan Jepang atau Belanda

Kurikulum 1952-1964
- SKB dua Menteri tahun 1951 yang menegaskan pendidikan agama wajib diberikan di sekolah, minimal 2 jam per minggu
- Dibuat kurikulum pendidikan agama di sekolah dan pesantren. Pendidikan agama mendapatkan porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah

Ki Hadjar Dewantara juga pernah mengakui bahwa eksistensi pesantren meskipun sebagai lembaga pendidikan rakyat (*partikelir*), tetapi kehadirannya sangat diharapkan ikut serta membangun karakter bangsa (Dewantara 1954). Sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk merelasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan nasional. Menurut Subhan, kebijakan tersebut bertujuan agar pesantren ikut serta berperan menyukseskan program pemerintah mencetak kader-kader bangsa mengisi kemerdekaan (Subhan 2009).

Kemerdekaan Indonesia 1945 memberikan perubahan yang revolusioner, termasuk terhadap pendidikan agama. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) pertama, Ki Hajar Dewantara saat berpidato di Alun-Alun Yogyakarta menyatakan bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah pemerintahan.

Demikian juga dengan Menteri PP & K yang keempat, Mr. Soewandi, yang menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran sebagai pedoman bagi para guru dalam mendidik peserta didiknya. 1) Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Perasaan cinta kepada alam; 3) Perasaan cinta kepada negara; 4) Perasaan cinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak; 5) Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; 6) Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; 7) Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; 8) Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; 9) Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atas harga diri sendiri; 10) Keyakinan bahwa negara memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, tahu pada wajibnya, jujur dalam pikiran dan tindakannya (Poerbakawatja, 1970).

Sidang Badan Pekerja Komite Nasional

Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 27 Desember 1945 merekomendasikan pembentukan Kementerian Agama, serta melakukan reformasi pendidikan yang di dalamnya juga termasuk pendidikan agama di sekolah negeri. Salah satu bunyi rekomendasi BP KNIP tersebut adalah "pelajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan- golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja" (Poerbakawatja, 1970).

Menindaklanjuti usulan BP KNIP, pada tanggal 1 Maret 1946 Menteri PP&K3 melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O3 membentuk sebuah komisi khusus bernama Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris. Berdasarkan hasil penyelidikan, laporan Panitia Penyelidik (2 Juli 1946) menyampaikan 9 pokok yaitu: 1) Hendaknya agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran; 2) Guru agama dibayar oleh pemerintah; 3) Di S.R (Sekolah Rakyat) pelajaran agama dimulai kelas IV; 4) Guru agama diangkat oleh Kementerian Agama; 5) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum; 6) Buku-buku pelajaran agama diadakan oleh Pemerintah; 7) Harus ada pendidikan guru agama; 8) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya; dan 9) Tidak perlu bahasa Arab (Poerbakawatja, 1970):

Namun sayangnya, sekalipun sudah menjadi rekomendasi, pendidikan agama tidak muncul dalam kurikulum sebagaimana yang terlihat dalam Rencana Pelajaran di Sekolah Rakyat pada tahun 1946 (yang disusun berdasar Keputusan Menteri PP&K tanggal 19 November 1946 No. 1153/Bhg.A). Setelah terbentuk Kementerian Agama, upaya-upaya untuk memasukan pendidikan agama ke dalam sekolah kurikulum sekolah negeri semakin intensif. Menteri Agama membuat kesepakatan bersama dengan Menteri PP & K tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 1142/Bhg. A (Pengajaran) Jakarta 2 Desember 1946 dan No. 1285/K-7 (Agama) Yogyakarta 12 Desember 1946, yang menyatakan bahwa pengajaran agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947 (Kosim, 2014). Peraturan Bersama tersebut menjadi landasan yuridis-operasional pertama penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.

Kemudian, pada 2 April 1950 pemerintah mengesahkan Undang- Undang No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Yang menarik, dalam UU tersebut disebutkan dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah "membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air".

Kurikulum Pendidikan Agama di Era Orde Baru

1 — KURIKULUM 1968
- Penyempurnaan dari kurikulum 1964.
- Tentang pendidikan agama, tidak ada perubahan

2 — KURIKULUM 1975
- SKB 3 menteri (Menteri agama, Menteri dalam negeri, menteri P & K
- Disusun kurikulum madrasah
- Porsi pendidikan agama 30%, dan pendidikan umum 70%
- Siswa di madrasah boleh pindah ke sekolah

3 — KURIKULUM 1984
- Penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya
- Penekanan pada Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)
- Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 2 menteri (Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri

4 — KURIKULUM 1994 & SUPLEMEN 1999
- Terbitnya UU Sisdiknas tahun 1989, yang di dalamnya disebutkan bahwa madrasah lembaga pendidikan berciri khasIslam
- Pendidikan agama berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional

Tidak ada frasa "manusia beriman dan bertakwa". Sekalipun demikian, hal ini tidak menjadi kontroversi dan perdebatan. Justru yang menjadi perdebatan saat itu terkait dengan terminologi "manusia susila" dan "warga negara yang demokratis" (Kosim, 2014).

Kendatipun tidak mencantumkan frasa katakanlah "beriman dan bertakwa" pengajaran agama mulai mendapatkan perhatian, karena dalam UU tersebut terdapat Bab XI tentang Pengajaran Agama di sekolah-sekolah Negeri, terutama pada pasal 20. Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa "dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut". Ayat (2) "cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.

Saat ini muncul perdebatan, apakah perdebatan agama perlu menjadi mata pelajaran wajib atau mata pelajaran fakultatif (tidak wajib). Perdebatan tentang hal ini mulai terjadi dalam sidang pada tanggal 26 Oktober 1949. Saat itu, Mohammad Sjafie membacakan "Nota Atjeh" yang ditandatangani Teuku Muhammad Daud Beureuh tanggal 16 Oktober 1949), yang mengusulkan agar pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah pemerintah. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1949, diputuskan bahwa kedudukan pendidikan agama di sekolah bersifat fakultatif. Jika dipandang dari perspektif teori politik, perdebatan yang berakhir dengan kekalahan kelompok Islamis atas kelompok nasionalis (Kosim, 2014).

Singkat kata, di masa Orde Lama, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah negeri. Namun, keberadaannya tidaklah begitu kokoh. PAI belum menjadi mata pelajaran wajib, bahkan orang tua siswa dan murid dewasa dapat memilih apakah akan mengikuti mata pelajaran PAI ataukah tidak. Karena itulah, mata pelajaran PAI bukan menjadi faktor penentu kelulusan seorang siswa, bahkan nilai dalam pelajaran PAI tidak dalam bentuk angka-angka, melainkan secara kualitatif ditulis dalam bentuk pernyataan; baik, sedang, dan kurang. Perhatian negara pada saat itu lebih banyak difokuskan pada penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan menjadi warga negara yang baik.

Memotret bagaimana pelajaran agama di setiap era, sesungguh tidak lepas dari bagaimana relasi umat Islam dengan pemerintah / penguasa atau bagaimana penguasa menempatkan umat Islam, serta bagaimana konteks dan karakteristik pemerintahan saat itu. Begitu juga dengan Orde Baru. Sebagaimana kita tahu, ada banyak peristiwa politik yang terjadi di masa awal-awal kepemimpinan Soeharto. Terobosan pertama pada Orde Baru ini dimulai pada sidang MPRS tahun 1966 yang memutuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Pada sidang MPRS tahun 1966 diputuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Ini merupakan titik balik kemenangan kelompok Islam melawan kelompok nasional seperti yang terjadi pada Orde Lama. Tak hanya itu, pendidikan Islam juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sejumlah pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya, yang dengan sistem madrasah ini berdampak pada tumbuh pesatnya perkembangan pesantren. Tak hanya itu, sejumlah tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Sayangnya, usulan tersebut tidak diterima. Keputusan Presiden No 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No 15 Tahun 1974 dinilai melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional

(Yuningsih, 2015).

Merespon reaksi umat Islam yang sangat keras, Orde Baru menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975, yang memberikan pengakuan eksistensi madrasah. Salah satu bentuk pengakuannya adalah dibolehkannya lulusan madrasah melanjutkan di sekolah umum yang setingkat lebih tinggi ataupun dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Namun demikian, SKB ini memberi beban yang sangat tinggi terhadap madrasah; keharusan perbaikan mutu pendidikan umum sesuai dengan standar sekolah, pada satu sisi, dan madrasah sebagai sekolah agama harus tetap menjaga mutu pendidikan agamanya, pada sisi yang lain.

Orientasi tersebut juga tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin gencar dengan pertumbuhan industrialisasi dan materialisme masyarakat. Syamsul melihat, bahwa masuknya anasir tersebut menumbuhkan orientasi monetisasi masyarakat pedesaan dan mengakibatkan modernisasi sistem pendidikan di Pesantren. Sehingga banyak pesantren di desa lebih banyak membuka kelas-kelas vokasi atau kejuruan karena memang tuntutan dari pola hidup masyarakat (Syamsul 2017).

Akomodasi pendidikan Islam semakin mengaut dengan terbitnya UU Sisdiknas Tahun 1989, yang di dalamnya (pasal 39 ayat 2) mewajibkan setiap jenjang pendidikan untuk memberikan pelajaran agama. Walaupun demikian, pada era Orde Baru (termasuk sampai saat ini), madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru sebagai lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama (Yuningsih, 2015).

Salah satu yang menarik dicatat juga terkait penggunaan seragam di sekolah. Saat itu, banyak sekolah yang melarang siswi yang beragama Islam menggunakan jilbab, bahkan tidak jarang siswa diberi sanksi jika menggunakan jilbab. Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan No.18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah satu poin dalam SK tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah (negeri) untuk mengambil kebijakan di tingkatan sekolah adalah poin yang menyatakan "Pelaksanaan pakaian seragam di sekolah-sekolah, bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada), diberlakukan secara persuasif, edukatif, dan manusiawi (Yuningsih, 2015).

Kurikulum Pendidikan Agama di Era Reformasi

1 KURIKULUM KBK

- Terbitnya UU No 20 Tahun 2003. "Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama"
- Dalam UU tersebut disebutkan frasa "kekuatan spiritual keagamaan" dan "akhlak mulia" sebagai salah satu tujuanpendidikan

2 KURILUKUM KTSP

- Penyelenggaraan PAI di madrasah / sekolah dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama: Permenag No 02 tahun 2008, menyangkut Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi

3 KURIKUKUM 2013

- Salah satu karakteristiknya adalah pendidikan karakter, yang di dalamnya juga memuat nilai-nilai Islam
- Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran wajib yang harus didapatkan oleh peserta didik.

4 UU PESANTREN

- Pada tahun 2019, pemerintah menerbitkan UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren. Ini merupakan satu langkah maju. Tetapi, tantangannya, bagaimana regulasi turunan dan implementasi di lapangan

Krisis moneter disertai dengan gelombang protes dari mahasiswa menjadi penanda berakhirnya era Orde Baru. Semangat

perubahan itu pun juga terasa pada bidang pendidikan, meskipun relatif terlambat. Pengganti UU Sisdiknas tahun 1989 baru mengalami pembaruan pada tahun 2003 dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Melalui UU ini diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK). KBK meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project*, tetapi ironisnya pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal (Aisyah, 2019). KBK pun mengalami sejumlah revisi dengan diterbitkannya pada tahun 2006 sejumlah permendiknas No 20, No 23, dan No. 24.

UU No 20/2003 tersebut sekurang-kurangnya menyinggung tiga hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. 1) ditempatkannya lembaga madasarah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah. 2), ditetapkannya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan kepada semua peserta didik. 3) seperangkat nilai-nilai Islam masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan, dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dari tujuan ini, tampak bahwa pendidikan nasional tak bisa mengabaikan fondasi agama dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada era reformasi ini, pendidikan Islam semakin mendapatkan tempat. Ini terbukti bukan hanya pada wajibnya mata pelajaran agama Islam di setiap satuan pendidikan, melainkan juga pengakuan terhadap ragam jenis pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Bahkan pada tahun 2019, lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Ini berarti bahwa akomodasi kekuatan Islam dalam struktur pendidikan nasional semakin kuat. Dari sudut pandang politik, semakin kuatnya dimensi "agama" dalam pendidikan tak bisa dilepaskan dari kondisi umat Islam yang semakin besar dan menguat, baik dari segi populasi maupun kekuatan politik. Namun demikian, hal ini keberadaan agama Islam sebagai mata pelajaran bukan tanpa persoalan.

PROBLEM PELAJARAN AGAMA ISLAM

Cita-cita umat Islam untuk menjadikan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran telah terwujud. Saat ini, tak ada satupun sekolah negeri yang dapat mengabaikan mandat dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama, termasuk Islam, sesuai dengan agama yang dianutnya.
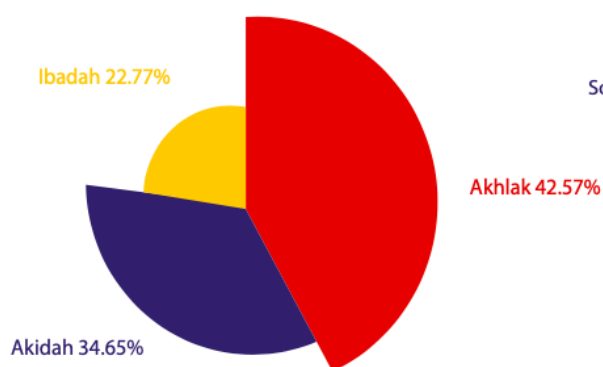
Gambar 2 Proporsi Materi PAIBP Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018

Gambar 3 Proporsi Materi Akhlak Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018

Secara yuridis memang demikian adanya. Namun, jika kita menengok fakta lapangan akan dijumpai fakta-fakta ironi. Bahwa tidak setiap peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya

dan diajarkan oleh yang seagama.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pendidikan Agama-Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama membuat kajian yang menarik terkait dengan Kompetensi Dasar PAI (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2020). Berdasarkan kajian t ersebut, ada empat temuan penting. *Pertama*, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. sudah memuat nilai moderasi beragama. Tapi Permendikbud tersebut kurang menekankan nilai moderasi beragama secara jelas dan kuat padahal nilai-nilai seperti menghargai perbedaan, keadilan, dan kerukunan adalah nilai-nilai yang dibutuhkan dalam keindonesiaan sekarang.

Kedua, proporsi terbesar materi PAI adalah akhlak (42%), kemudian aqidah (35%), dan ibadah (23%). Akhlak yang ditekankan adalah akhlak personal (79%), seperti sopan santun dan jujur, kemudian akhlak sosial (18%) seperti tolong menolong, dan terakhir akhlak civic (3%) seperti toleransi beragama. Proporsi akhlak *civic* yang sangat minimal ini jelas kurang mendukung sikap rukun, gotong royong dalam keragaman dan kebangsaan Indonesia. Porsi penekanan pada akhlak civic yang kecil pada satu sisi dan porsi akhlak personal yang demikian besar, secara tidak langsung menjelaskan mengapa intoleransi masih menjadi tantangan termasuk kalangan pemuda generasi penerus bangsa.

Ketiga, jumlah Kompetensi Dasar (KD) PAI sangat banyak dengan total 684 KD, jauh lebih banyak ketimbang PPKN yang memiliki 236 KD ataupun jika dibandingkan pendidikan agama lainnya. Selain banyak materi yang disajikan, KD juga kurang mengangkat nilai dan konteks Islam Indonesia, beberapa terkadang mengandung pesan atau penjelasan yang ambigu (tidak jelas sehingga mudah disalah tafsirkan) dan lebih menekankan pada aspek kognitif (74%) sehingga KD cenderung tidak menjamin siswa memiliki kemampuan elementer, seperti terampil membaca Al-Qurán, hafal bacaan salat, hafal surat-surat pendek, dan lain-lain. Dengan jumlah KD yang terlalu ambisius mengharapkan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran PAI. Sementara itu, alokasi jam pelajaran PAI cukup terbatas. Dampaknya sangat fatal; peserta didik tidak dapat menguasai semua materi.

Gambar 4 Proporsi Aspek Komptensi Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018

Keempat, aspek-aspek yang dikembangkan Kompetensi Dasar dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, tidak seimbang, di mana kompetensi kognitif memiliki porsi sebesar 74%, sementara afektif sebesar 18%, dan psikomotorik sebesar 8%. Padahal kurikulum 2013 jelas mengamanatkan

kompetensi kognitif dan psikomotorik harus berimbang dan lebih aplikatif. Bahkan, dalam catatan PPIM, kompetensi psikomotorik yang terkandung berada pada tataran paling rendah.

Itu baru problem pada aspek Kompetensi Dasar. Problem lainnya tak kalah menyedihkan, mulai dari rendahnya kompetensi guru PAI baik dalam penguasaan konten keislaman, sampai -terutama-pada bagaimana guru PAI turut andil dalam menyemai intoleransi di Indonesia sebagaimana temuan Alvara Research Center tahun 2017. Survei Alvara terhadap 4.200 siswa mahasiswa di Jawa dan sejumlah kota besar di luar Jawa menghasilkan temuan yang menyedihkan.

- Hampir 25% peserta didik 'siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah'
- Kurang dari 20% peserta didik lebih memilih ideologi Islam dibanding Pancasila
- Hampir 20% peserta didik yang setuju khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI
- Sekitar 20% peserta didik menganggap Perda Syariah tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas
- Hampir 25% peserta didik setuju dengan pernyataan 'negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh)'

Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah kepada 2.237 guru Muslim di 34 provinsi mendapatkan hasil yang juga menyedihkan:

- 40.36% guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat.
- 82.77% guru setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat.
- 62.22% guru setuju bahwa hanya sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam yang terbaik untuk negeri ini.
- 75.98% guru setuju bahwa pemerintah harus memberlakuan syariat Islam bagi para pemeluknya.
- 79.72% guru setuju bahwa dalam memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota), umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam.
- 23.42% Guru setuju bahwa pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah thaghut karena telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum.
- 64.23% Guru setuju bahwa non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi Presiden di Indonesia.

DOGMATIS ATAU ETIS-MORAL?

Jika mencermati problem di atas, kita mesti sadar bahwa menjadikan Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah tidak cukup hanya sampai di situ. Maka pertanyaan berikutnya adalah, ke arah mana bagaimana seharusnya Islam diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah? Bagaimana PAI diajarkan, serta apa saja cakupan dan muatannya? Apa tujuan dan fungsi Pendidikan Agama Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara?

Sekurang-kurangnya, ada dua kecenderungan paradigmatik tentang apa konsep dan tujuan PAI diajarkan di sekolah --khususnya sekolah negeri. *Pertama*, PAI harus menjadi jangkar untuk menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai keislaman secara mendalam dan menyeluruh. Artinya,

melalui pelajaran PAI, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan seluruh ajaran, sejarah, dan pengetahuan ilmu-ilmu keislaman. Dalam paradigma ini, maka muatan PAI akan lebih fokus pada aspek-aspek doktrinal dari Islam. Dampaknya, siswa di sekolah diharapkan bukan saja dapat membaca dan menghafal al-Qur'an dengan baik, tetapi juga memahami secara mendalam ajaran-ajaran Islam, mulai dari akidah, fiqh, sampai pada sejarah peradaban Islam. Orang yang berada pada kelompok ini berkeinginan untuk mengimpor kajian keislaman di pesantren dan madrasah untuk dibawa ke sekolah negeri.

Paradigma di atas membawa konsekuensi pada luasnya cakupan dan muatan mata pelajaran PAI, sebagaimana yang tergambar pada jumlah KI/KD pada kurikulum 2013. Dengan cakupan yang demikian luas, maka kesempatan untuk memahami secara mendalam dan melakukan refleksi atas pembelajaran menjadi kurang perhatian. Karena itulah, jika mengikuti paradigma ini, maka cara termudah yang lazim digunakan oleh para guru PAI adalah meminta siswa untuk menghafal, mulai dari ayat al-Qur'an, hadist nabi, maupun hukum-hukum Islam. Padahal, kurikulum 2013 bercita-cita agar pembelajaran itu bukan sekedar pada hafalan, tetapi juga mengandaikan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*).

Kedua, kelompok yang memahami bahwa tujuan dari PAI itu adalah lebih spesifik membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan keperibadian muslim, yaitu untuk memiliki akhlak yang baik, meskipun pelajaran agama tidak diganti dengan pelajaran akhlak dan etika (Syahidin 2005). Secara lebih jauh Pendidikan Agama Islam itu dirumuskan dari pendidikan Islam yang esensinya mendorong manusia untuk memiliki kehidupan dinamis berlandaskan nilai-nilai dan moral yang tinggi. Dengan prinsip demikian akan terbentuk pribadi yang sempurna baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya (Nizar 1995). Pada kelompok kedua ini, muatan-muatan PAI akan disimplifikasi dan diorientasikan kepada aspek etis-moral dari Islam.

Untuk merespons dua kecenderungan di atas, hal pertama yang perlu dijawab adalah apa tujuan Pendidikan Agama Islam diajarkan kepada seorang siswa di sekolah (bukan madrasah, apalagi pesantren)? Apakah bertujuan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman secara mendalam ataupun lebih menekankan pada pembentukan moral?

Sebenarnya, penguasaan ilmu-ilmu keislaman dengan pembentukan moral tidaklah dikotomis, tetapi bersifat mutualistik-simbiosis. Hal ini karena dalam Islam, pengetahuan dan sikap tidaklah dikotomis. Pengetahuan akan memiliki dampak pada sikap, dan sikap yang baik akan menjadi modal untuk menggali ilmu pengetahuan. Meskipun kolaborasi antara pengetahuan dan sikap sering kali dipertanyakan. Pasalnya, banyak pengetahuan yang tidak mempengaruhi sifat, atau bahkan pengetahuan itu justru digunakan untuk penguasaan. Dari sinilah kemudian lahir teori poskolonial di antaranya dipelopori oleh Edward Said (Nurhadi 2007). Namun dalam pandangan Islam, pengetahuan justru diharuskan melahirkan sikap yang baik. Misalnya tercermin dalam istilah sematan orang "alim" yang menurut bahasa Arab ia selain pandai berpengatahuan juga bisa mengamalkan pengetahuannya.

Berikutnya, tujuan, cakupan dan muatan pembelajaran agama Islam di sekolah pasti berbeda dengan di madrasah ataupun pesantren, karena kedua lembaga pendidikan tersebut memiliki akar, latar belakang, sejarah dan tujuan yang berbeda. Latar belakang dan tujuan berdirinya madrasah memang berfokus pada kajian keislaman, sehingga pelajaran umum

merupakan "pendatang" di madrasah. Sebaliknya, sekolah lebih berfokus pada pelajaran umum, sehingga "pelajaran agama" merupakan "pendatang". Karena itulah, struktur kurikulum keduanya berbeda. Dari akar, latar belakang dan tujuan kedua lembaga tersebut, maka dapat dipahami bahwa jika seseorang hendak mendalami ilmu-ilmu keislaman, maka tempat terbaik adalah madrasah, bukan sekolah.

Dengan cakupan yang demikian luas, maka kesempatan untuk memahami secara mendalam dan melakukan refleksi atas pembelajaran menjadi kurang perhatian. Karena itulah, jika mengikuti paradigma ini, maka cara termudah yang lazim digunakan oleh para guru PAI adalah meminta siswa untuk menghafal, mulai dari ayat al-Qur'an, hadist nabi, maupun hukum-hukum Islam.

Dengan demikian, pelajaran agama Islam di sekolah tentu tidak boleh seluas dengan pelajaran agama Islam di madrasah. Kendatipun demikian, karena tidak ada dikotomi soal pengetahuan dan pembentukan moral-etis, maka cakupan dan muatan PAI di sekolah harus keduanya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana pembagian keduanya? Apakah aspek kognisi PAI yang memuat sejumlah ajaran-ajaran doktrinal Islam lebih dominan lebih dominan ketimbang pembentukan moral? Ataukah sebaliknya, pembentukan moral lebih dominan? Atau dibagi sama?

Dalam hemat penulis, PAI di sekolah harus lebih berorientasi pada pembentukan moral-etis peserta didik ketimbang menjejali peserta didik dengan berbagai ilmu-ilmu keislaman yang memiliki cakupan dan muatan yang sangat luas. Pembentukan moral-etis-lah yang perlu menjadi visi dari PAI di sekolah, sehingga hal-hal lain perlu diarahkan untuk mencapai visi tersebut. Ketika belajar tentang sejarah peradaban Islam, misalnya, maka PAI bukan sekedar menarasikan ulang fakta-fakta kesejarahan Islam, mulai dari masa nabi Muhammad sampai saat ini di Indonesia. Lebih dari itu, materi sejarah perlu dibawa ke dalam kerangka pembentukan moral-etis peserta didik, sehingga dengan topik sejarah peradaban, peserta didik dapat mengambil inspirasi untuk dikontekstualisasikan ke ruang dan tempat peserta didik berada.

Tentu saja, hal-hal pokok dari ajaran Islam tetap perlu diajarkan, seperti rukun iman dan rukun Islam. Karena pembentukan moral menjadi visi dari PAI, maka rukun iman dan rukun Islam juga bukan sekedar dihafalkan oleh peserta didik, tetapi juga bagaimana dampaknya kepada pembentukan moral-etis; baik secara individual, sosial, ataupun civic. Misalnya, dengan rukun iman pertama, beriman kepada Allah, bukan sekedar membahas aspek teologisnya dengan menjabarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadist tentang keesaan Allah. Lebih dari itu, dengan

beriman hanya kepada Allah, maka membawa implikasi pada, misalnya, kesadaran bahwa sikap dan perilakunya selalu dalam pengawasan Allah (ihsan), sehingga tindakan-tindakan amoral seperti *bullying*, intoleransi, kekerasan, dan lain sebagainya dapat dihindari. Dengan iman kepada Allah, misalnya, dapat membawa peserta didik pada sikap mental percaya diri akan masa depan, ia tidak khawatir dan cemas tentang apa yang akan terjadi, baik pada dirinya maupun pada lingkungan sekitarnya.

Begitu juga ketika belajar tentang wajibnya shalat. Selain memuat syarat, rukun dan hal yang membatalkan shalat, yang tak kalah pentingnya adalah mengajarkan bagaimana shalat ini memberi implikasi kepada peserta didik. Al-Qur'an sendiri yang menegaskan bahwa shalat dapat mencegah dari perbuatan munkar dan keji. Namun, faktanya tidak sedikit orang yang rajin shalat di saat bersamaan juga rajin melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Karena itu, materi tentang wajibnya shalat juga perlu dibawa kepada pembahasan bagaimana shalat ini membawa perubahan kepada dirinya, baik secara personal, sosial maupun *civic*.

Orientasi tersebut sangat penting diberikan kepada peserta didik mengingat banyaknya sekolah yang mengajarkan materi normatif agama tetapi tidak menyentuh pada kesadaran sosial. Bahkan kontra dengan unsur-unsur sosial, seperti tidak berkenan hormat bendera, tidak memiliki toleransi terhadap keragaman umat beragama. Kasus ini seperti yang ditemukan oleh riset yang dilakukan oleh Kemenag dan Wahid Institute pada 2016 lalu.

Dengan menjadikan "pembentukan moral-etis" sebagai visi PAI, maka muatan dan cakupan PAI tidak perlu terlalu meluas dan mendalam sebagaimana pelajaran ilmu-ilmu keislaman di madrasah/pesantren. Contohnya, sekalipun "jihad", dan "khilafah" termaktub dalam studi-studi dan sejarah keislaman, topik ini dapat saja dieliminir, karena keduanya tidak termasuk rukun iman dan rukun Islam. Atau, jika pun terpaksa harus ada dalam muatan PAI, topik "jihad" dan "khilafah" harus dikontekstualisasikan. Misalnya, bagaimana wujud dan bentuk jihad dalam konteks negara damai seperti Indonesia.

PAI di sekolah harus lebih berorientasi pada pembentukan moral-etis peserta didik ketimbang menjejali peserta didik dengan berbagai ilmu-ilmu keislaman yang memiliki cakupan dan muatan yang sangat luas. Pembentukan moral-etis-lah yang perlu menjadi visi dari PAI di sekolah, sehingga hal-hal lain perlu diarahkan untuk mencapai visi tersebut.

AKHLAK SEBAGAI MUARA

Dengan menjadikan pembentukan peserta didik yang berakhlak sebagai muara dari mata pelajaran PAI, maka muatan ataupun topik lainnya harus dibaca ke dalam kerangka pembentukan akhlak tersebut. Penempatan akhlak sebagai muara dari PAI ini sangat signifikan dalam konteks Indonesia hari ini. Karena faktanya, tidak sedikit dijumpai siswa yang rajin shalat, rajin pula minum narkoba. Tidak sedikit siswa yang rajin berpuasa tetapi di saat bersamaan ia melakukan *bullying* ataupun melakukan kekerasan kepada temannya. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang rajin melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji tetapi di saat bersamaan rajin menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan berupaya menyalahi konsensus berbangsa: ber-Pancasila dan ber-NKRI.

psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda (Mahmud, 2004) .

Definisi tentang akhlak yang menarik seperti disampaikan oleh Al-Jurjani bahwa akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berfikir dan merenung. Jika dari sifat tersebut terlahir perbuatan-perbuatan yang indah menurut akal dan syariat, dengan mudah maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Sedangkan jika darinya terlahir perbuatan perbuatan buruk, maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang buruk (Dewi, 2021).

Karena itu, pertama-tama kita perlu memperjelas apa itu akhlak, dan bagaimana cakupannya. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, yang dimaksud dengan akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik ini membentuk kerangka

Dalam Al-Qur'an kata akhlak juga digunakan dalam konteks makna yang kaitannya tidak hanya menjalin hubungan baik kepada manusia, tetapi juga menjalin hubungan baik kepada Allah. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Qalam ayat 4, "*Dan sesungguhnya engkau benar-benar dalam budi pekerti yang agung*." Menurut para ulama dari ayat itu bisa dilihat bahwa akhlak dibangun

berdasarkan nilai-nilai ilahiyyah, nilai-nilai kemanusian dan dilandasi dengan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, akhlakul karimah dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. *Pertama*, akhlak pribadi. Akhlak dalam kategori ini lebih pada sifat, tabiat dan relasi baik bersama dengan Tuhannya yang selalu dibina. Dalam beribadah, Imam Nawawi al-Bantani dalam salah satu kitabnya memberikan contoh ibadah shalat sebagai medium membangu akhlak pribadi ini.

Kedua, akhlak sosial. Dalam ajaran Islam, para ulama sering memberikan penalaran kenapa setelah shalat harus ada zakat? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa shalat menjadi media membangun relasi baik antara diri manusia dengan Tuhannya, jika zakat merupakan cerminan dari ibadah sosial. Karena dalam Islam ibadah sosial tidak kalah pentingnya dengan ibadah ritual. Sehingga ibadah seorang hamba dianggap sempurna jika dua unsur ibadah tersebut terpenuhi dengan baik.

Ketiga, akhlak lingkungan. Dalam diskursus kaidah ushul Fiqih dikenal dengan terma *hifdhul bi'ah* (menjaga lingkungan). Di dalam terma tersebut tidak hanya mengatur bagaimana seharusnya manusia menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan baiknya dengan alam semesta.

Keempat, akhlak civic atau kewarganegaraan. Para pendiri bangsa telah bersepakat tentang Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Konsensus ini harus dipatuhi, karena nabi sendiri bersabda bahwa seorang muslim terikat dengan perjanjian, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah. Melalui Piagam Madinah tersebut disepakati beberapa pokok yang mengatur pola relasi antar warga negara Madinah, termasuk jaminan perdamaian kepada seluruh warga negara. Dalam pasal 25 Piagam Madinah disebutkan,

> *Sesungguhnya Yahudi Bani Awf satu umat bersama orang-orang Mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku dzalim dan berbuat dosa atau berkhianat. Karena sesungguhnya yang demikian hanya akan melecehkan diri dan keluarga.*

Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, peraturan bersama yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa itu adalah Pancasila dan UUD 1945 beserta Undang-Undang dan peraturan lainnya. Dengan adanya peraturan bersama, maka satu kelompok tidak boleh mengusir kelompok lain. Nah, untuk menghasilkan kesepakatan atau peraturan bersama itu maka masing-masing kelompok atau perwakilannya perlu duduk bersama untuk bermusyawarah. Al-Qur'an benar-benar memberi tuntunan yang sangat baik bagaimana berinteraksi dengan kelompok lain yang harus lemah lembut, tidak keras kepala dan memberikan maaf kepada mereka yang bersalah serta mengedepankan musyawarah, sebagaimana yang terangkum dalam Ali Imran 159.

CATATAN REKOMENDASI

Dengan demikian, pelajaran PAI bukan saja membentuk peserta didik yang memahami ajaran-ajaran Islam, tetapi juga secara kontributif terlibat dalam proses pembangunan bangsa dan negara, menjaga kerukunan dan perdamaian, melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan. Untuk mewujudkan hal ini, ada beberapa rekomendasi kepada para pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama; sebagai berikut:

1. Perlunya menyusun ulang tujuan, cakupan dan muatan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dari yang semula sangat dominan pada aspek kognitif dan akhlak pribadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh kajian PPIM, kepada upaya pembentukan etika-moral (*akhlakul karimah*), termasuk akhlak *civic* sebagai konsekuensi menjadi bagian dari warga negara.
2. Muatan dan cakupan mata pelajaran PAI sebagaimana yang tergambar pada Kompetensi Dasar perlu disederhanakan dengan memilah, memilih dan memodifikasi hal-hal yang perlu (wajib) ada dalam PAI dan hal-hal yang disarankan ada.
3. Sebagai konsekuensi pada visi pembentukan moral (*akhlakul karimah*), maka visi-misi satuan pendidikan dan iklim budaya sekolah juga harus diarahkan kepada pembentukan moral-etis ini. Dampaknya, maka akan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler yang mendukung upaya pembentukan moral-etis

Hal yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi guru, bukan hanya terkait dengan metode pengajaran (pedagogi) dan kedalaman konten ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga soal wawasan kebangsaan, sehingga para guru PAI memiliki perspektif dan wawasan kebangsaan, turut aktif dalam menjaga NKRI, perdamaian dan kerukunan bangsa Indonesia. Ke arah itulah pelajaran Pendidikan Agama Islam mesti menuju. *Wallahu 'a'lam*

Daftar Pustaka

Aisyah, S. (2019). Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi. *Tarbiyah Islamiyah*, *9*(2), 41-62.

Anwar, M. K. (2020). Penguatan Kitab Kuning dan Tahfiz Al-Qur'an Sebagai Basis Pendidikan di Madrasah dan LP Ma'arif NU dalam Lanskap Fikrah Nahdliyah. *Asna: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan*, *2*(1), 28-37.

Azra, A. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Kompass.

CNN. (2021, 03 Rabu). *Nadiem Bingung Ada Polemik Frasa Agama di Visi Pendidikan*. Retrieved 05 Senin, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210310115718-20-615955/nadiem-bingung-ada-polemik-frasa-agama-di-visi-pendidikan

CNN. (2021, 03 Selasa). *MUI Kritik Nadiem Tak Sertakan Agama di Visi Pendidikan 2035*. https://www.cnnindonesia.com. Retrieved 05 Senin, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309123608-20-615461/mui-kritik-nadiem-tak-sertakan-agama-di-visi-pendidikan-2035

Dewantara, K. (1954). *Peringatan Taman-Siswa 30 Tahun: 1922–1952*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Hadi, S. (2017). *Arah Baru Lembaga Pesantren dalam Pandangan Masyarakat Desa: Idealisme Versus Pragmatisme* (PDF) [Disertasi]. Institut Pertanian Bogor.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peta Jalan Pendidikan*

Indonesia 2020-2035. Kemendikbud.

Kosim, M. (2014). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pada Masa Orde Lama. *Karsa*, *Vol. 22*(1), 1-20.

Maksum. (1999). *Madrasah dan Perkembangannya*. Logos.

Mulkan, dkk, A. M. (1994). *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek*. Pustaka Pelajar.

Noer, D. (1988). *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*. LP3ES.

Peraturan Pemerintah (Ed.). (2007). *Peraturan Pemerintah NO 55 tahun 2007*. Kemendikbud.

Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Gunung Agung.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. (2020, Maret). *Masalah Kompetensi Dasar: Beberapa Hal yang Perlu Dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Memperbaiki Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. PPIM & Kementerian Agama. https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/07/24/perkuat-kurikulum-ppim-susun-naskah-sanding-pai/

Rahim, H. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Logos.

Republika. (2021, Maret Ahad). *Frasa Agama Hilang, Ini Kata Asosiasi Guru Agama Islam*. https://www.republika.co.id. Retrieved Mei Ahad, 2021, from https://www.republika.co.id/berita/qplplr428/frasa-agama-hilang-ini-kata-asosiasi-guru-agama-islam

Sarno Hanipuddin. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Journal of Islam dan Muslim Society*, *1*(1).

Subhan, A. (2009). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*. UIN Syarif Hidayatullah dan LPJM.

Suminto, H. (1994). *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3S.

Syahidin. (2005). *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*. Ponpes Suryalaya Tasikmalaya.

Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Jurnal Tarbiya*, *1*(1), 175-195. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/142/pdf_8
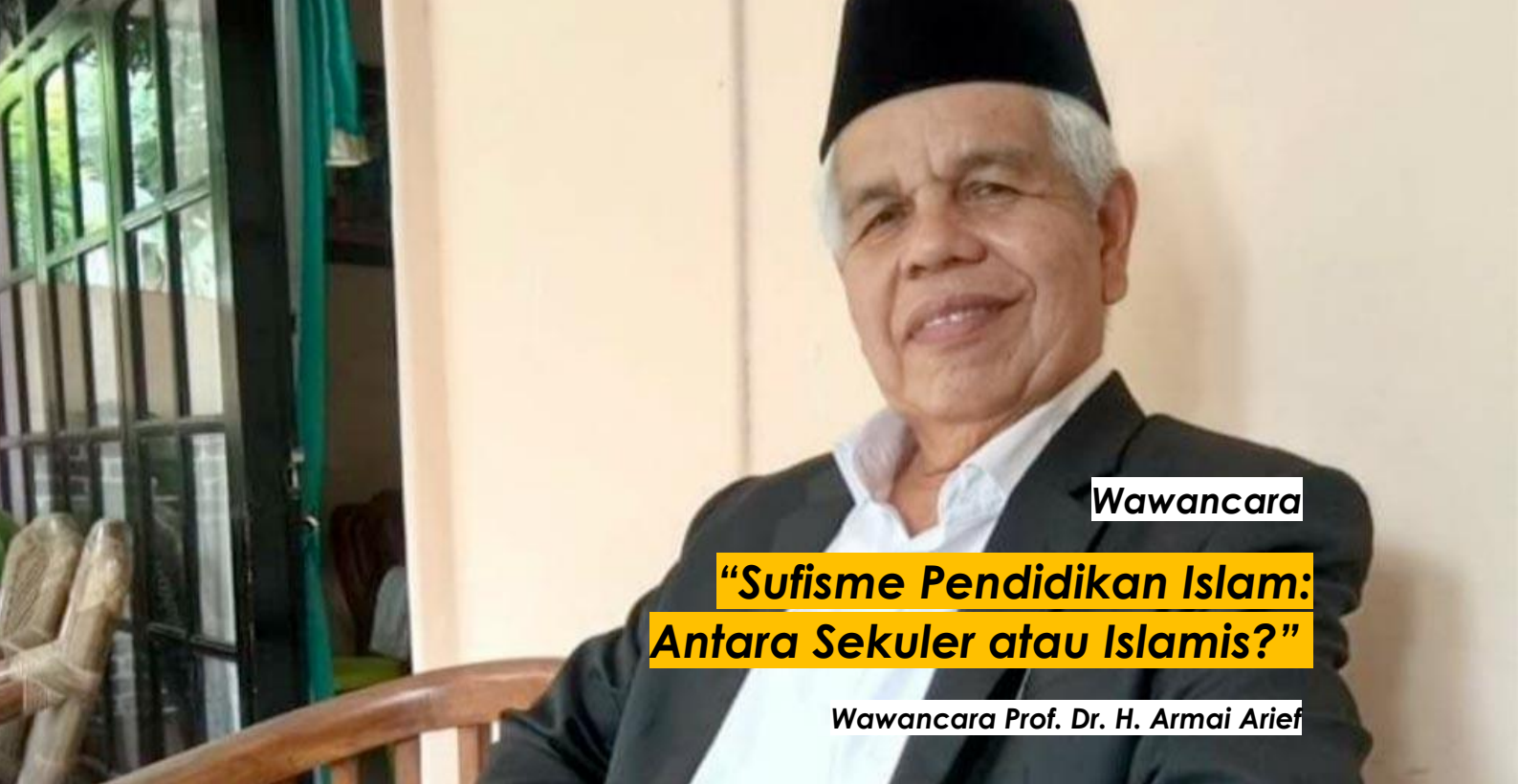
Wawancara

"Sufisme Pendidikan Islam: Antara Sekuler atau Islamis?"

Wawancara Prof. Dr. H. Armai Arief

Perbincangan soal pendidikan agama dalam landscape pendidikan nasional seringkali memantik kontroversi. Bagaimana sebaiknya, Pendidikan Agama Islam (PAI) ditempatkan dalam pendidikan nasional, bagaimana pula mestinya PAI diajarkan. Ada dilema yang cukup tajam, apakah PAI yang diajarkan hanya memuat ajaran dan nilai Islam dalam konteks relasi antar manusia sebagai konsekuensi dari menjaga keragaman dan kerukunan, ataukah ajaran-ajaran dogmatis, termasuk soal jihad dan khilafah, juga perlu diajarkan. Khoirul Anwar dari Islamina berhasil mewawancarai Prof. Dr. H. Armai Arief, M.Ag, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) Majelis Ulama Indonesia, secara virtual, pada Sabtu 21 Mei 2021.

Islam hidup di Indonesia di tengah keragaman agama/kepercayaan, bagaimana pandangan Anda terkait dengan relasi Islam dan negara?

Berbicara tentang keragaman tentu kiranya Indonesia memang memilikinya, tetapi akankah keragaman dalam sebuah konteks terkait relasi Islam dan negara dapat bersinergi, sangat mungkin terjadi (Pasti). Mari sejenak kita bersama *flashback*, ke dalam sebuah sejarah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka, sejatinya tidak terlepas dari peran para ulama. Sedangkan kita ketahui bahwa ulama yang dimaksud juga sangat beragam paham (Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dan lain sebagainya), yang semuanya beragama Islam.

Dalam al-Qur'an maupun Hadits memang tidak ditemukan istilah atau konsep tentang negara. Hal ini dapat dimaklumi karena konsep negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527). Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat al-Qur`an dan Hadits yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Dan jelas, terdapat banyak ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum- hukum Allah dalam kehidupan masyarakat dan negara, meski tak ada satu ayat pun yang menunjukkan keharusan mendirikan negara. Hal ini kemudian dipahami, bahwa negara atau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum-hukum itu,

sehingga pendirian negara masuk dalam kaidah: *mā lā yatimm al- wājib allā bih fahuwa wājib*. Dari segi istilah, negara Islam (*daulah Islamiyyah*) itu sendiri baru muncul pada pertengahan abad ke-20 lalu, yang dipahami sebagai negara yang melaksanakan etika dan syariah Islam. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa ajaran yang dibawa merupakan bagian dari pancaran rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana salah satu firman Allah SWT, dalam al-Qur`an surat al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya*: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. Al-Anbiya [21]:107).*

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. diutus sejatinya untuk memberikan rahmat bagi seluruh manusia. Barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, niscaya dia akan berbahagia dan selamat, dan barang siapa tidak beriman, maka dia akan gagal dan merugi. Oleh karena, beberapa kriteria (sifat) yang diajarkan dan ditanamkan Rasulullah Saw. (*Shidiq, Amanah, Tabligh, Fatanah*). Yang utamanya mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berkhusnudzan (berprasangka baik) kepada setiap manusia.

Selanjutnya, rahmat bagi seluruh manusia itu dimaksudkan bukan hanya ditunjukkan pada orang Islam. Tetapi sebagai seruan-ajakan untuk semuanya (termasuk non muslim). Dan di sanalah Tuhan Allah Swt. menciptakan beraneka ragam bentuk dan rupa manusia yang dibekali akal dan hati, sehingga memiliki pemikiran-pendapat yang berbeda. Terlepas ia mengakui adanya ke-esa-an Allah Swt. atau tidak sebagai Tuhan, bukan menjadi perdebatan. Karena Islam tidak mengajarkan paksaan melainkan ajakan. Dengan perbedaan itulah bukan berarti umat manusia khususnya Islam tidak dapat bersatu, justru dengan perbedaan melahirkan persatuan dan kesatuan serta menyemai kedamaian dalam kebajikan.

Sebagai ilustrasi, bahwa salah satu butir Pancasila sila kesatu adalah Ketuhanan yang maha esa. Merupakan salah satu bukti nyata untuk dipedomani dalam sebuah keragaman beragama, kita meyakini bahwa setiap agama tentu mengajarkan kebaikan-kebajikan. Sila kesatu juga tidaklah mudah didengar dan diketahui seperti sekarang ini, justru mengalami berbagai macam perdebatan (masukkan, saran, atau bahkan kritikan) yang membangun sehingga melahirkan sebuah kalimat yang sekarang lazim kita ketahui. Dan inilah salah satu bentuk dedikasi pejuang bahwa dalam mencetuskan Pancasila dari setiap butir syarat akan kehati-hatian untuk dapat merangkul seluruh elemen rakyat. Sebagaimana semboyan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi Bhineka Tunggal Ika-berbeda-beda tetap satu jua.

Secara substantif, terdapat sejumlah ayat al-Qur`an dan Hadits yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. Dan jelas, terdapat banyak ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan masyarakat dan negara, meski tak ada satu ayat pun yang menunjukkan keharusan mendirikan negara.
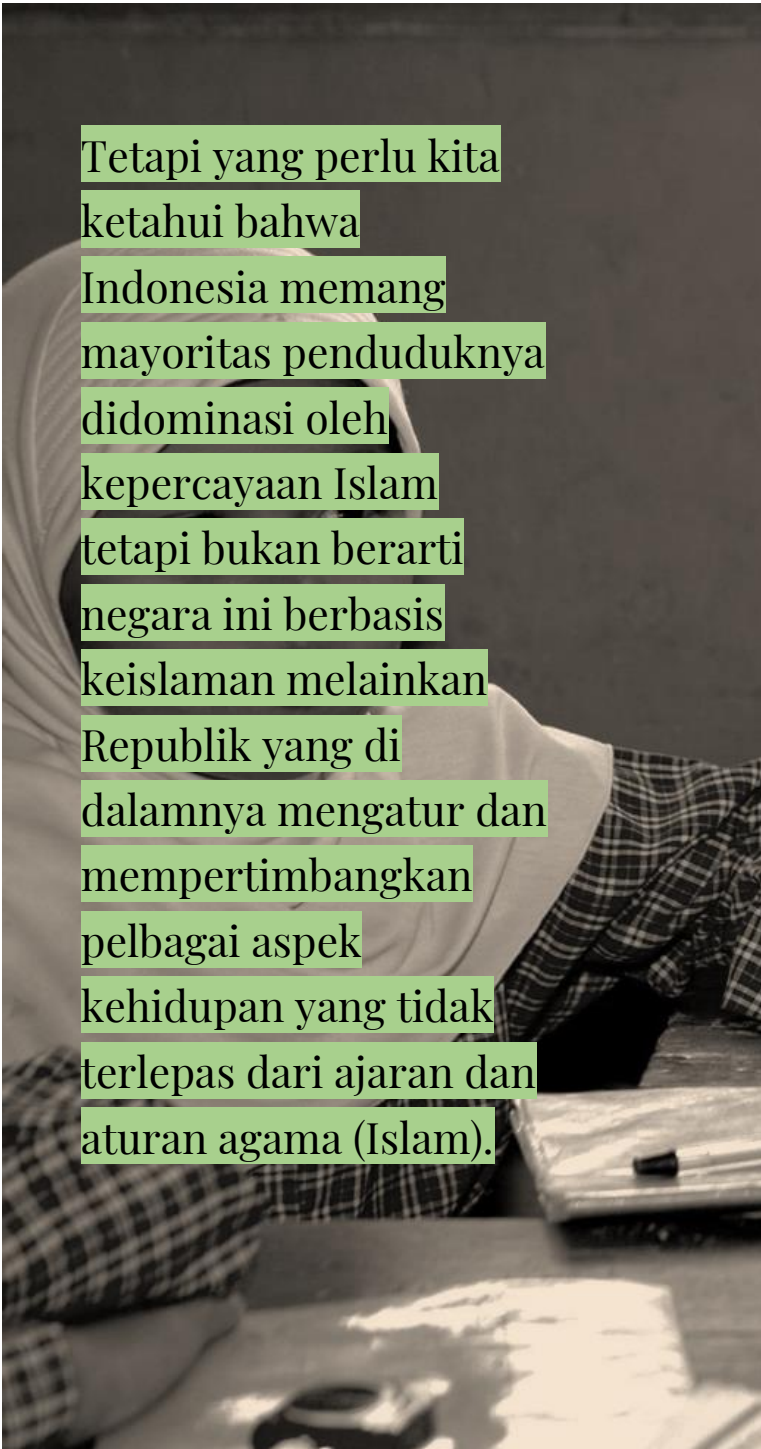
Dengan demikian, kenyataannya antara relasi Islam dan Negara, sangatlah memiliki keterikatan baik dalam sebuah sistem, maupun sebuah kebijakan-*policy*, yang tertuang pada UUD 1945, dan Pancasila. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia memang mayoritas penduduknya didominasi oleh kepercayaan Islam tetapi bukan berarti negara ini berbasis keislaman melainkan Republik yang di dalamnya mengatur dan mempertimbangkan pelbagai aspek kehidupan yang tidak terlepas dari ajaran dan aturan agama (Islam).

Ragam perkembangan inilah yang kemudian menjadi tugas kita sebagai penjaga dan pemelihara kedaulatan dan kemerdekaan negara, tetaplah saling menghargai menghormati, dan menyayangi sesama dalam kebaikan dan kebenaran. Walaupun sekarang ini kita sedang dihadapkan dalam suasana wabah yang disebut COVID-19 (*Corona Viruses Diases*). Dan inilah sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah Swt. Sehingga kita senantiasa selalu ingat pada-Nya.

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia dan memiliki peran yang sangat penting, bisa dijelaskan bagaimana pandangan anda agar Islam dapat menjadi sumber peradaban bangsa dan negara Indonesia?

Keberadaan Islam di Republik ini memang sangat penting kehadirannya, mengingat Islamlah yang secara mendominasi di dalamnya. Hampir sebagian besar penduduk Indonesia (90%) beragama Islam. Lanjut dikatakan, perjuangan republik ini juga tidak terlepas dari para pejuang bangsa, ulama, santri, bahkan rakyat yang serta merta juga ikut mendukung untuk sebuah kemerdekaan NKRI. Hal yang penting adalah bagaimana kita memelihara kemerdekaan itu agar tetap utuh dan berkembang dari pelbagai sektor kehidupan masyarakatnya salah satunya dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan (Umum-Agama) di pelbagai pelosok daerah sebagai manifestasi peradaban bangsa dan negara Indonesia.

Peradaban memiliki banyak pengertian, bisa dikatakan dalam dimensi bahasa Indonesia (Kebudayaan-Indonesia), Inggris (Peradaban-*Civilization*; dan Kebudayaan-*Culture*) sedang bahasa Arab (Kebudayaan-*Tsaqafah*; Kemajuan- *Hadharah*; Peradaban-*Tamaddun*) atau bahkan Islam (agama) yang sempurna dan dilaksanakan pelbagai tempat sehingga disebut sebagai akar kata *Din-Madinah* yang kemudian dibentuk akar kata baru *madana* (membangun, mendirikan kota, memartabatkan) dan lahirlah kata benda *Tamaddun* tersebut di atas, sehingga keduanya bisa dikatakan sebagai sebuah kebudayaan dan peradaban.

Islam sangat berkontribusi mendirikan dan melegitimasikan suatu peradaban, selain dari pada ajaran yang diperintahkan dalam kepercayaannya, sudah barang tentu peradaban juga dapat membangkitkan dan memberikan *impact* positif bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini juga bagian dari pada pesan para pendiri bangsa yang sejatinya mengingatkan kepada kita untuk tetap menjaga keutuhan dan kemajuan melalui karya nyata sebagai bukti konkret yang ada dari sebuah peradaban.

Terlepas dari hal tersebut, Islam juga dapat membuktikan peradaban-kebudayaan dengan memelihara, merawat suatu tradisi yang sudah menjadi doktrin kuat di tengah masyarakat. Seperti halnya adat istiadat di pelbagai daerah yang ada di Nusantara bahkan dunia baik yang masih dilakukan atau sudah menjadi suatu peninggalan, sejarah berdirinya para pejuang kerajaan dan pejuang kemerdekaan, adanya situs, cagar budaya, masjid-surau, pondok pesantren, atau bahkan lembaga Pendidikan dan Perpustakaan yang berbasis Ke-Islam-an sebagai sumber utama sejarah untuk menjaga peradaban dan kebudayaan Islam, bangsa dan negara.

Dengan demikian, Islam sangat menjunjung dan menghormati para pejuang, oleh karena hal itu bagian dari bagaimana Islam dapat mengedepankan adab karena adab berbicara tentang sopan santun, tata krama, etika, perilaku, dsb. Kemudian diwujudkan oleh umat Muslim dari setiap perkembangannya melalui sektor kehidupan, baik dalam sektor politik, ekonomi, atau bahkan sektor sosial lainnya. Yang mengarahkan kepada perilaku *Ibadah Mahdhah* dan *Ghairu Mahdhah.*

Semoga dengan menjaga dan merawat peradaban dapat menjadikan kita bangsa yang tahu akan terima kasih atas pelbagai perjuangan para pejuang, sehingga kita tetap terus berjuang untuk mempertahankan dan mengeskalasikan kualitas pengetahuan dan keilmuan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Salah satu pelajaran wajib di sekolah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), apa peran, tujuan dan fungsi PAI dalam upaya membentuk peradaban bangsa Indonesia?

Pendidikan Agama Islam di sekolah memang memiliki peran yang sangat strategis. Kenapa tidak? Karena PAI menjadi rujukan mata pelajaran yang wajib untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, ia masuk pada ranah Kurikulum Nasional. Selain itu, pendidikan Agama Islam juga memberikan khazanah keilmuan sebagai jendela cakrawala pelbagai pandangan tentang keislaman di mana masyarakat Indonesia hampir sebagian besar beragama Islam.

Sejalan dengan hal tersebut, peran serta PAI akan terus menggalakkan suatu peradaban (sejarah) dalam proses pembelajarannya untuk terus dapat dipelajari, dan dikaji secara mendalam. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab II pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depag RI, 2003: 37). Dan dalam pasal 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan pada pasal 2 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan

kewarganegaraan, dan bahasa (Depag RI, 2003: 50-51).

Selanjutnya, dilihat dari sejarah sebelumnya yang dinyatakan melalui Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menetapkan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama pembangunan nasional. Dengan dicantumkannya kata-kata keimanan dan ketakwaan dalam asas pertama pembangunan nasional dan dalam tujuan pendidikan nasional di atas, menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan merupakan ciri utama kualitas manusia Indonesia, di samping ciri-ciri kualitas yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menafikan keberadaan agama Islam. Karena konsep ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya berasal dari ajaran Islam, begitu pula dengan budi pekerti dalam tujuan tersebut, tidak lain juga harus sesuai dengan kriteria *akhlakul karimah* (Achmadi, 1992: 102). Oleh karena itu, hendaknya Pendidikan Agama Islam (PAI) ditujukan ke arah tercapainya keserasian dan keseimbangan pertumbuhan pribadi yang utuh lewat berbagai latihan yang menyangkut kejiwaan, intelektual, akal, perasaan dan indra (Ahmad Ludjito, 1996: 299).

Sedang Tujuan dari PAI di Sekolah merupakan legitimasi dari adanya pengembangan misi keislaman itu sendiri yang memosisikan dan mengajarkan tentang memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat manusia, menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, egaliter, musyawarah, toleransi, persaudaraan, perdamaian, tolong menolong, rukun, damai, saling menghargai, menghormati, melindungi, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pendidikan Agama Islam merekomendasikan agar berbagai cara dan pendekatan yang dilakukan dalam memperjuangkan suatu kebenaran dalam tataran apa pun termasuk bangsa dan negara yang kemudian *impact* ke dalam sebuah peradaban tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Hal yang bertentangan dalam Islam dan tidak dibenarkan di dalamnya, dapat dilihat seperti melukai, meresahkan, merusak, dan sebagainya dalam memperjuangkan sebuah usaha dan kegiatan yang mengatasnamakan kebenaran. Dengan demikian, cara kekerasan, terorisme, dan tindakan biadab lainnya tidak dibenarkan secara mutlak dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 132 sebagai berikut.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya*: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (Qs. Al-Baqarah [2]:132).*

Kemudian Fungsi PAI di Sekolah memberikan dasar penguat dan penyeimbang dalam menghadapi proses kehidupan sebagai bentuk implementasi peradaban dari Pendidikan yang diajarkannya. Salah satunya berorientasi pada istilah *maqashid al-syar`iyah* yang terdiri dari lima hal di antaranya; *pertama*, memelihara agama (*hifdz al-din*), *kedua*, memelihara akal (*hifdz al-`aql*), *ketiga*, memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), *keempat*, memelihara harta (*hifdz al-maal*), dan *kelima*, memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Lebih lanjut dikatakan, bahwa PAI dalam fungsinya juga memiliki komitmen untuk berorientasi pada; pengembangan potensi peserta didik muslim sebagai makhluk yang dapat dididik, mewariskan nilai- nilai budaya Islam kepada peserta didik sebagai generasi penerus-kandidat pemimpin umat, menggaungkan sumber utama dan pendukung dalam ajaran Islam seperti (al-Qur`an, hadits, Ijma, Qiyas atau

hasil Ijtihad) guna memperluas pengetahuan dan memberikan pengertian bahwa di samping ia sebagai muslim, ia juga sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki falsafah hidup bangsa yaitu UUD 1945 dan Pancasila.

karena itu, hendaknya Pendidikan Agama Islam (PAI) ditujukan ke arah tercapainya keserasian dan keseimbangan pertumbuhan pribadi yang utuh lewat berbagai latihan yang menyangkut kejiwaan, intelektual, akal, perasaan dan indra

Apa catatan kritis anda terhadap penyelenggaraan PAI di sekolah?

Penyelenggaraan PAI di sekolah saat ini, sebetulnya sangat penting dibutuhkan mengingat tantangan zaman yang semakin kompleks, mengharuskan peran Pendidikan Agama Islam sebagai "jalan tengah" untuk dapat memberikan sumbangsih pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Sementara perlakuan Mata Pelajaran PAI di sekolah dan di Madrasah tentu memiliki perbedaan, perbedaan ini dapat dilihat dari segi keterlibatan jumlah Jam MP PAI (akidah akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, Quran-Hadits) yang sangat sedikit kehadirannya pada Sekolah Umum lebih kurang setidaknya 2 Jam Pelajaran per minggu disesuaikan dengan jenjang atau tingkatannya. Alih-alih ingin mewujudkan peserta didik yang paham akan keimanan dan ketakwaan, kebijaksanaan dan penghormatan sebagai sebuah implementasi dari karakter, akhlak dan sumber pengetahuan untuk dapat menyikapi dengan sebaik-baiknya, nyatanya tidak dapat diserap dengan baik karena alokasi waktu tak sebanding dengan porsinya.

Pendidikan agama Islam merupakan suatu pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai agama agar bisa menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Pendidikan agama Islam tidak bisa jauh dari pendidikan karakter karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan siswa agar memiliki karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sebagian besar Muslim itu berpendidikan, tetapi mereka tidak mempunyai karakter Islam. Itu merupakan tantangan seorang guru PAI dalam membangun karakter siswanya. Strategi dalam hal pembelajaran juga harus diperhatikan agar siswa mampu menerima ajaran dan dapat menerapkan di lingkungan sekitar.

Selama ini, memang dijumpai, untuk Mata Pelajaran PAI dapat bersinergi dengan kegiatan ekstrakurikuler katakanlah ROHIS di sekolah, tetapi keberadaan ROHIS juga perlu adanya upaya revitalisasi sebagai dasar eksistensi dan pengarah dari para pimpinan dan dewan guru atau bahkan melibatkan seorang tokoh agama sekitar guna mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil kebijakan. Singkatnya

perlu ada sinergi dari berbagai pihak baik dalam tataran sekolah, keluarga atau pun masyarakat.

Perubahan dalam menyongsong arah kebijakan seyogianya ada revitalisasi Pembelajaran PAI di sekolah baik dari segi jam/waktu, muatan materi, atau pun pendekatan dan metode pembelajaran yang diterapkan serta pembinaan terhadap Guru PAI Khususnya dan Guru lain pada Umumnya. Karena kita tahu, selama ini banyak di antara peserta didik sering kali diberikan pelbagai pengetahuan tetapi terkadang lupa untuk mengimplementasikannya. Dan saat inilah dipandang perlu untuk dapat melakukan perubahan tersebut. Salah satunya melalui pendekatan *Humanis* dan menggunakan metode *Problem Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah) atau pembelajaran yang dihadapkan dengan proses pembelajaran yang nyata dan kompleks sebagai sebuah ilustrasi untuk mengasah kepekaan dan keterampilan (berpikir, dan seni).

Besar harapan saya Pembelajaran Agama Islam, dapat memberikan dampak nyata dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah titah visi dan misi Islam yang baik. Sebagaimana tertuang dalam Pancasila yang sering disebut falsafah, cita-cita luhur, pandangan hidup, dan keadaan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, dan karena Pancasila dijadikan arah dan landasan utama pembangunan bangsa dan negara republik Indonesia. Pancasila berisi keinginan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beragama, bersatu, berperikemanusiaan, berdaulat secara demokratis, bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera lahir dan batin.

Terkait ROHIS, ada banyak kasus yang terjadi, yakni brainstorming siswa/pelajar sehingga mereka mempunyai sikap intoleransi. Bagaimana seharusnya sekolah atau lembaga membendungnya?

Pantauan terakhir, memang banyak ROHIS yang dimasuki atau terpapar oleh paham-paham dogmatis (hitam-putih, haram-halal). Misalnya, kalau Anda tidak melakukan ajaran Islam seutuhnya, tidak dikategorikan Muslim bertakwa. Atau salah mengartikan "Jihad". Inilah yang saya maksud untuk harus direvitalisasi.

Alih-alih ingin mewujudkan peserta didik yang paham akan keimanan dan ketakwaan, kebijaksanaan dan penghormatan sebagai sebuah implementasi dari karakter, akhlak dan sumber pengetahuan untuk dapat menyikapi dengan sebaik-baiknya, nyatanya tidak dapat diserap dengan baik karena alokasi waktu tak sebanding dengan porsinya.

Jadi, sekolah/lembaga harus ikut mengawasi. Pengawasan bisa melalui Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Dengan mendalami PAI intrakurikuler, dan menyelaraskannya dengan ekstrakurikuler. Harus diingat, tidak boleh memasukkan ajaran-ajaran di luar intrakurikuler!, inilah yang sangat dikhawatirkan.

Mudah sekali ROHIS mendatangkan atau mengundang tokoh, *influencer*, ustadz, dan guru yang berpaham radikal-intoleran tanpa sepengetahuan sekolah. Kenapa tanpa sepengetahuan sekolah?, karena memang kegiatannya dilaksanakan di luar sekolah. Faktanya memang demikian.

Saya pernah menemukan salah satu tempat yang di mana anak-anak dikader oleh mereka. Kemudian bertemu dengan para pengajar atau pengkader anak-anak, dan setelah berbincang dengan mereka, dapat disimpulkan bahwa ajarannya sangat merusak tujuan dari pendidikan nasional. Misalnya, jihad itu boleh dengan harta dan nyawa melalui mencuri.

Oleh karena itu, sekolah/lembaga agar merevitalisasi ROHIS. Kegiatan-kegiatan ROHIS dianjurkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian harus ada standarisasi orang yang terlibat sebagai tutor atau pelatih ROHIS. Selanjutnya adalah kelembagaan ROHIS tentunya harus secara demokrasi. Pemilihan terbuka dengan melibatkan perwakilan setiap kelas.

Sebagaimana kita tahu, Islam memuat ajaran-ajaran yang sempurna, mulai dari akidah, fikih, tasawuf, sejarah, dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya muatan dan cakupan PAI di sekolah di mana warga sekolah itu beragam?

Sebuah landasan dapat dijadikan pijakan yaitu termaktub dalam al-Qur`an yang merupakan firman Allah Swt. Terdapat pada surat ali-Imran ayat 19 yaitu *"Inna ad- Dina Inda Allah al-Islam"* (Agama yang diterima disisi Allah hanyalah Islam). Islam dinyatakan sebagai agama yang diridhai Allah yang di dalamnya terdapat kesempurnaan. Karena Islam datang dan dibawa oleh Rasulululllah Saw. Yang kemudian juga dinyatakan kedatangannya membawa kebaikan dan keselamatan. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Qs. ali-Imran: 85 yaitu *"Waman Yabtaghi Ghairal Islami Dinan, Falan Yuqbala Minhu wahuwa Fil Akhirati Minal Hasirin"* (Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi).

Menyikapi dua landasan di atas, seyogianya kita dapat melihat dengan luas bahwa memang benar Islam merupakan agama yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Swt. Untuk memberikan peningkatan akan landasan dimaksud tentu kiranya perlu ada pengejewantahan dalam proses pendidikan yang dikemas melalui pembelajaran. Kesempurnaan dimaksud memberikan ikatan yang harus dilakukan oleh setiap manusia sebagai bentuk penghambaannya kepada Tuhan dengan cara saling mengenal dan menghormati sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-Qur`an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. al-Hujurat [49]:13)*

Dalam indikator saling kenal-mengenal dapat diasumsikan bahwa betapa tidak membeda-bedakannya Allah Swt, sehingga memberikan ruang gerak kepada manusia untuk dapat berbaur (bergaul) dalam upaya meningkatkan keutuhan dan kepedulian dalam bingkai silaturahmi. Yang implikasinya membawa keberkahan. Oleh karenanya, Islam merupakan agama yang komprehensif menyeluruh mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya sebagai bentuk kemudharatan dan kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya.

Ajaran Islam sebagai ajaran lengkap, utuh, kukuh, komprehensif, *integrated*, dan holistik memiliki prinsip yang dijadikan landasan operasionalnya. Berdasarkan kajian dan analisis terhadap ayat al-Qur`an,

hadits, al-ra`yu dan fakta sejarah, termasuk untuk kemajuan bangsa dan negara. Maka diketahui bahwa sejatinya muatan PAI meliputi; manusia dan agama, agama Islam, sumber agama dan ajaran Islam, kerangka dasar dan ajaran Islam, akidah, syari`ah-syari`at, akhlak, takwa, menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam, Islam dan ilmu pengetahuan. Sedangkan cakupan PAI sejalan dengan prinsip ajaran Islam menyasar pada aspek; fithrah manusia (*Muthabaqah Li Fithrah al-Nās*), keseimbangan (*al-Tawāzun*), sesuai berdasar perkembangan keadaan zaman dan tempat (*shālihun Li Kulli Zamān Wa Makān*), Tidak menyusahkan manusia (La Tu`assir Lin-Nās), sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Muthabaqah Li Tanmiyah Al-`Ilm Wa Tekcnologiya*), berbasis pada penelitian (*Muwaqif `Ala Al-Hashil Al-Tabayyun*), berorientasi pada masa depan (*Muwajjih Ala Al-Waqt Al-Atiyah*), kesederajatan (*Al-Musawah*), keadilan (*al-`adl*), musyawarah, persaudaraan (*ukhuwah*), dan keterbukaan.

Dari rincian-uraian di atas, menjelaskan bahwa setidaknya cakupan dan muatan PAI di sekolah sejatinya, dapat merangkul seluruh komponen pendidik dan peserta didik, karena dengan keberagaman peserta didik dari pelbagai latar kepercayaan, yang setidaknya memiliki perbedaan, kiranya cakupan dan muatannya tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pengetahuan yang bersifat positif. Dan tentunya kita dapat sama-sama menghargai tatkala dijumpai peserta didik yang berasal dari latar kepercayaan yang berbeda, dengan memberikan opsi-pilihan yang berada di sekolah-mengikuti kegiatan yang lain atau turut serta di dalamnya dengan adanya kesepakatan dan sepengetahuan orang tua. Inilah tantangan sebuah negara yang rakyatnya memiliki keragaman atau warna kepercayaan.
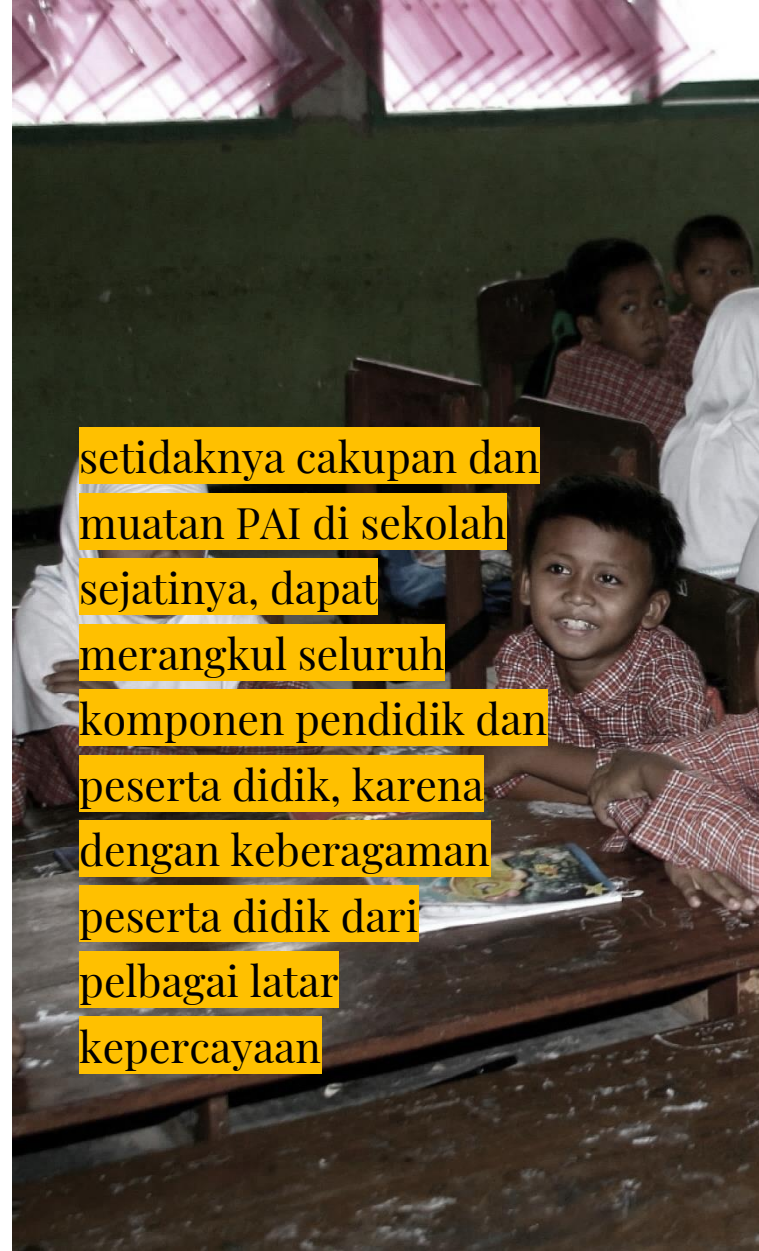
setidaknya cakupan dan muatan PAI di sekolah sejatinya, dapat merangkul seluruh komponen pendidik dan peserta didik, karena dengan keberagaman peserta didik dari pelbagai latar kepercayaan

Sekurang-kurangnya ada dua pandangan terkait PAI; a) PAI harus memuat semua ajaran-ajaran dalam Islam termasuk dogma, ritual, ataukah b) lebih menekankan dimensi etis dari Islam. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi dua paradigma tersebut?

Dalam hal menyikapi kedua pandangan di atas, tentunya umat Islam disuguhkan dengan nuansa yang tidak asing lagi dan tidak menjadi sebuah kebaruan juga. Adanya pandangan tersebut memberikan angin segar untuk dilakukan pembobotan dalam pemberian sub materi Pendidikan Agama Islam sehingga perlu diberikan skala atau pembagiannya. Pembagian di sini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang sama atau porsi yang memang sangat urgen dibutuhkan pada tataran

perkembangan zaman. Umat Islam melihatnya bahwa kondisi yang relevan saat ini menurut penulis, seharusnya lebih menekankan pada aspek dimensi etis dari Islam, sebagai hasil dari proses cakupan dan muatan Pendidikan Agama Islam di atas. Tetapi bukan berarti ajaran dalam Islam termasuk dogma, ritual itu kemudian dihilangkan. Tetap diberikan ruang sebagai bukti peradaban dan kebudayaan yang melekat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.

Pandangan di atas seyogianya mengisyaratkan bahwa memang tantangan eksternal Pendidikan Agama Islam-PAI sebetulnya dapat kemas dalam dua dimensi yaitu Umum dan Khusus. Di antara dimensi umum dapat dinyatakan sebagai berikut; *pertama*, paham keagamaan masih dogmatis-normatif; *kedua*, semakin meratanya pengetahuan agama; *ketiga*, masing-masing merasa memiliki otoritas; *keempat*, tidak adanya tokoh sentral yang diteladani; *kelima*, semakin kuatnya pengaruh sains dan teknologi; dan *keenam*, rentannya budaya masyarakat muslim. Sedang Dimensi khusus dapat dinyatakan sebagai berikut; *pertama*, warisan agama yang masih cenderung dogmatis; *kedua*, adanya pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum; *ketiga*, tidak adanya keberanian mengubah paradigma sekularisasi agama; *keempat*, masih adanya paham *value free* (nilai kosong) baik dalam kehidupan maupun ilmu; dan *kelima*, kepeloporan pihak penguasa terhadap perubahan paradigma yang masih sekularistik.

Pemetaan di atas tentunya lebih berorientasi pada dimensi etis dari Islam, mengingat hal tersebut akan dapat melekatkan keyakinan mendalam bagi hambanya, sehingga pengimplementasian akan keutuhan Tuhan itu esa nyata adanya yang didasari pada al-qur`an surat al-Ikhlas sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.اللَّهُ الصَّمَدُ.لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: *Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa; Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan; dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". (Qs. al-Ikhlas .)1-4:]112[*

Ragam muslim di Indonesia dalam mengimplementasikan kepercayaan, setidaknya ia meyakini dan mengetahui bahwa syariat dan hakikat itu ada dalam Islam dan semuanya bersumber atas

kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, tetaplah kita bersatu padu menjalin dan mengeskalasikan persatuan dan kesatuan sebagai bentuk persaudaraan. Adanya pembagian ini dimaksudkan sebagai dasar *screening* (pengevaluasian) dan pemetaan dari urgensitas muatan materi yang akan diberikan kepada peserta didik yang memberikan dampak bagi agama bangsa dan negara. Perkembangan PAI di Sekolah berdasarkan sejarah hanya sebagai mata pelajaran tambahan kini keberadaannya menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan. Dengan pelbagai perkembangannya PAI haruslah menyasar pada Aspek Holistik sebagaimana tertuang pada ajaran Islam. Aspek holistik di sini mencakup pada: *pertama*, Tujuan contohnya (pembelajaran seumur hidup, bersifat komprehensif, menjadikan peserta didik sebagai *khairu ummah*); *kedua*, Pandangan terhadap Peserta didik contohnya (Pemahaman anak secara utuh, pikiran, tubuh, jiwa, multi intelegensi, dan juga gaya belajar); *ketiga*, Apa yang harus diajarkan contohnya (gagasan yang *powerfull* dan pertanyaan brillian terhadap dunia secara utuh-multikultural); *keempat*, bagaimana mengorganisir contohnya (kurikulum terpadu, pembelajaran integrated); dan *kelima*, bagaimana mengajarkannya contohnya (sesuai dengan kemampuan peserta didik, pengajaran yang bervariasi, pemanfaatan lingkungan).

Salah muatan yang kerap muncul dan menjadi kontroversial dalam PAI adalah terkait dengan topik khilafah Islam, jihad dan pandangan Islam terkait agama lain, menurut anda apakah ketiga topik tersebut penting diajarkan? Jika tidak, kenapa? Jika iya, bagaimana keduanya harus diajarkan?

Dalam mengamati suguhan kopi panas tidaklah mudah diminum sampai habis. Tetapi konsensusnya adalah berdasarkan sejarah memang fakta tentang khilafah itu sendiri ada dan pernah dipraktikkan salah satunya pada masa kepemimpinan *al-khulafa `al-Rasyidun* yang disebut dengan *al-khilafah al-Rasyidah* model kenegaraan yang sangat sesuai pada eranya. Mengingat bahwa ketika itu kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*) atau perkumpulan bangsa-bangsa.
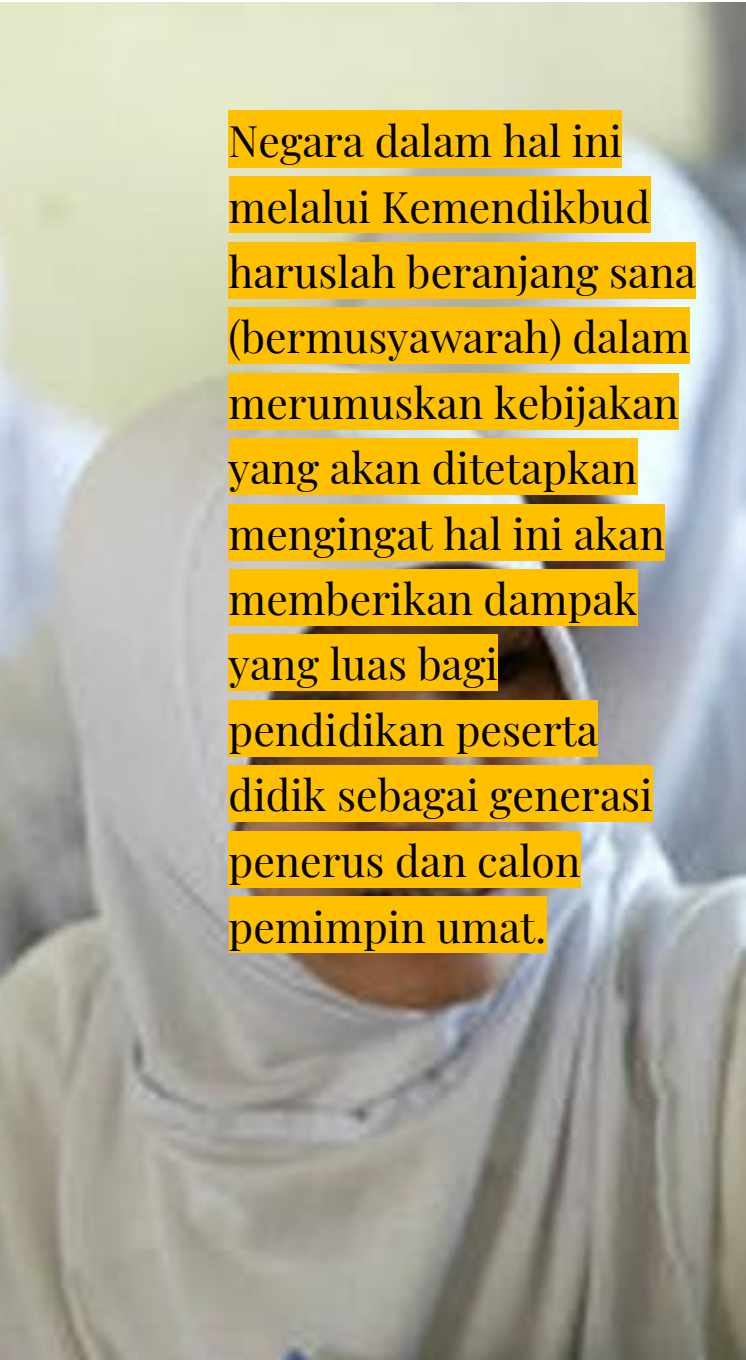
Negara dalam hal ini melalui Kemendikbud haruslah beranjang sana (bermusyawarah) dalam merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan mengingat hal ini akan memberikan dampak yang luas bagi pendidikan peserta didik sebagai generasi penerus dan calon pemimpin umat.

Relevansi eksistensi khilafah sekarang ini; akankah mungkin terjadi kembali?. Tentu kiranya tidak dapat mungkin atau hanya sebagai angan-angan belaka, hal ini sebagai salah satu janji leluhur para pendiri bangsa, bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk untuk mewadahi seluruh elemen bangsa yang sangat majemuk-beragam baik dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama. Sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat termasuk Islam di dalamnya untuk mempertahankan dan merawat serta memperkuat benteng pertahanan dari kehancuran yang disebabkan terjadinya atas pergolakan dan pergerakan yang menentang keutuhan dan menimbulkan *kemafsadatan* (kerusakan) bangsa dan negara Indonesia harus ditindak dengan tegas.

Hal ini dapat diperkuat oleh pendapat Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din yang menyatakan sebagai berikut:

الدين و الملك توأمان، فالدين أصل و السلطان حارس، فما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Artinya: *Agama dan Kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan Fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan.*

Negara dalam hal ini melalui Kemendikbud haruslah beranjang sana (bermusyawarah) dalam merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan mengingat hal ini akan memberikan dampak yang luas bagi pendidikan peserta didik sebagai generasi penerus dan calon pemimpin umat.

Oleh karenanya Pendidikan Agama Islam dalam muatan materinya harus dikemas sebaik mungkin jangan kemudian kriteria atas pertanyaan di atas itu kembali didapatkan pada buku-buku yang beredar luas. Harus melalui tim pemantau dan peninjau. Ketika berbicara penting atau tidak dapat dilihat dari arah (kacamata) mana kita menganalisisnya, kalau mengingat hal tersebut sebagai sebuah sejarah yang memang ada sebelumnya tidaklah salah dalam mempelajarinya, tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana hal tersebut tidak dapat dijadikan konsumsi instan bagi peserta didik untuk kemudian muncul pergerakan yang memunculkan kerusakan dan pertengkaran atas doktrin yang ia pelajarinya. Kalau kriteria di atas (pertanyaan) tidak relevan dengan sekarang ini sehingga menyandra bahkan merusak keutuhan bangsa dan negara maka hendaknya ditiadakan. Oleh karenanya Islam dalam hal ini generasi penerus sebagai peserta didik jangan lah kita mudah untuk kemudian diadu dombakan apalagi menyeru dengan berbagai simbol-simbol keislaman atas nama kebenaran, tetapi bagaimana kita menjaga nama baik agama dalam sebuah negara yang sah, sehingga tidak mencederai agama Islam itu sendiri.

Bagaimana seharusnya negara, dalam hal ini Kemendikbud, menempatkan PAI dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara?

Kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya, ia diibaratkan sebuah benang yang pada waktunya dapat ditarik dan diulur berdasarkan kebutuhannya bukan justru dihilangkan. Mengenai hal tersebut seharusnya negara harus bersyukur atas dedikasi peran agama Islam melalui para pejuang dengan segala tuntunan yang diajarkannya. Kalaulah negara sebagai tuan rumah maka agama lebih dari itu; ia adalah fondasi. Fondasi yang harus dijamu dan dirawat oleh tuan rumah itu sendiri dengan pelbagai aspeknya,

sehingga negara menjadi kuat dan teguh serta tegak berdiri berdasarkan tuntutan dan perkembangan zaman.

Pemeliharaan sebuah negara akan berkembang dengan berbagai sektor yang dikelolanya baik secara pemberdayaan sumber daya manusianya atau pun sumber daya alamnya. Suatu sistem demokrasi akan terwujud jika didukung oleh ketiga unsur dalam sebuah negara, yaitu adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*), dan adanya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat dan mandiri. Untuk menjaga dan memberdayakan sumber daya manusia, maka perlu diwujudkan melalui aktivitas pembelajaran salah satunya di lembaga pendidikan.

Stabilitas negara perlu memberikan sumbangsih pendidikan melalui berbagai kebijakannya yang dapat merangkul seluruh elemen bangsa. Hal ini menjadi tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian dapat diaplikasikan oleh seluruh pendidik di sekolah. Sejatinya cakupan dan muatan Pendidikan Agama Islam perlu adanya pembaharuan dan inovasi terlebih dari aspek ideologi sebagai dasar agama, dan bernegara. Negara dalam hal ini melalui Kemendikbud haruslah beranjang sana (bermusyawarah) dalam merumuskan kebijakan yang akan ditetapkan mengingat hal ini akan memberikan dampak yang luas bagi pendidikan peserta didik sebagai generasi penerus dan calon pemimpin umat. Pada proses merumuskan kebijakan sejatinya para tokoh dari pelbagai unsur (agama, nasional, NU, Muhammadiyah, MUI, dsb) harus dilibatkan guna mendapatkan rumusan dan isi dari sebuah materi yang akan diajarkan tidak terjadi ketimpangan, seperti yang sebelumnya sudah terjadi, yang diindikasikan sejarah tentang ke-NU-an dihilangkan dalam sejarah sekarang ini. Dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Selain itu, unsur penentu keberhasilan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam-PAI di Sekolah dapat diuraikan pada ranah sebagai berikut; Penentu Kebijakan (Pemerintah dan DPR-DPRD), Kepala Sekolah, Guru, *Steakholders*, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kesiapan Peserta Didik, dan Ketauladanan dari semua pihak.

Sebagaimana merdekanya negara Indonesia, Islam memiliki kontribusi yang besar untuk dapat mengubah pemikiran untuk dapat berkembang dan melihat dengan spektrum yang luas. *Wal hasil,* pelbagai dinamika pendidikan yang disuguhkan termasuk kehadirannya Pendidikan Agama Islam di sekolah turut memiliki andil dalam mengubah perilaku dan menyikapi perbedaan di atas kemajemukan masyarakat yang plural. Hal ini seirama dengan Garis-garis besar program pengajaran (GBPP) PAI yang menjelaskan bahwa PAI adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pendidikan Agama Islam dulu dan kini sangat perlu dihadirkan jangan sampai dihapuskan dalam kurikulum nasional, kalau sekarang kita masih banyak terjadi ketimpangan bagaimana ke depannya jika Pendidikan Agama Islam itu dihapuskan tentu akan terjadi degradasi moral atau bahkan lebih dari itu, bukan lagi berbicara ketimpangan. Menurut hemat saya di tengah suasana negara demokrasi ini menempatkan PAI dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah tepat, karena ia sebagai salah satu nilai-nilai dasar baik dalam aspek keimanan (akidah) atau pun aspek kemasyarakatan (nilai etika-moral). Nilai-nilai atau prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut: keadilan (*al-`adālah*), kepercayaan dan

akuntabilitas (*al-amānah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan kemajemukan (*al-ta`adduddiyyah*), persamaan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), permusyawaratan (*al-Syûrā*), perdamaian (*al-silm*), *maqashid al-syari`ah* dan *Islam Rahmatan Lil `Alamin*.

Beberapa waktu yang lalu, banyak sekali komentar terhadap Kemendikbud terkait penghapusan frasa 'agama' dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Yang kami tanyakan, apakah selama ini ada pertarungan ideologi di dalam kementerian atau pemerintahan?

Kami dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah bersilaturahim dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Beliau juga menjelaskan visi-misi peta tersebut. Memang, draft yang pertama (sebelum revisi) di dalam visi-misi tidak ada kalimat beriman dan bertakwa. Draft awal tersebut merupakan sesuatu yang diributkan. Adapun draft kedua sudah direvisi dan mencantumkan frasa 'agama'.

Visi-misi dari Peta Jalan Pendidikan kita kritisi secara tertulis. Dari komisi pendidikan dan kaderisasi MUI juga menyiapkan. Terdapat poin-poin yang belum sempurna, ataupun kurang. Tetap kita kritisi mulai dari visi-misi sampai tujuan Peta Jalan Pendidikan.

Yang kedua, kalimat 'cinta tanah air,' yang ada Profil Pelajar Pancasila dengan wawasan global. Ini juga kita usulkan, sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional. Yang membuat menjadi persoalan adalah kenapa sekarang tidak ada?. Hal ini yang menjadikan hipotesis, mungkin ada perang ideologi ataupun kepentingan juga di situ. Inilah yang tetap terus kita kawal. Sampai sekarang juga belum disahkan. Apakah dalam bentuk Peraturan Menteri (PERMEN) atau Peraturan Presiden (PERPRES).

> Sebagaimana merdekanya negara Indonesia, Islam memiliki kontribusi yang besar untuk dapat mengubah pemikiran untuk dapat berkembang dan melihat dengan spektrum yang luas. *Wal hasil,* pelbagai dinamika pendidikan yang disuguhkan termasuk kehadirannya Pendidikan Agama Islam di sekolah turut memiliki andil dalam mengubah perilaku dan menyikapi perbedaan di atas kemajemukan masyarakat yang plural.

Gagasan

Pelajaran Agama Islam: Sekular atau Islami?

Muhammad Mustafid

Pengasuh Pesantren Pelajar-Mahasiswa Aswaja Nusantara Mlangi, Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU]

"bahwa akhir-akhir ini begitu banyak sosok manusia Indonesia yang tampil penuh pamrih, tidak tulus ikhlas...dan sifat-sifat buruk lainnya". Padahal di sisi lain, masyarakat Indonesia akrab dengan nilai-nilai luhur seperti "hidup bersahaja (aja dumeh)", "mengesampingkan reputasi dan mendahulukan karya (sepi ing pamrih rame ing gawe)..." (Budimansyah, 2010;2)

Topik "Pendidikan Agama Islam: Sekuler atau Islami" barangkali merupakan reproduksi pertarungan diskursus lama. Paling tidak, hal ini dapat dilacak pada Polemik Kebudayaan tahun 1930-an. Dalam Polemik Kebudayaan, salah satunya, diperdebatkan paradigma pendidikan Indonesia: mengacu ke Barat seperti diusung STA ataukah berpijak pada model pendidikan pesantren seperti dilontarkan Ki Hadjar Dewantara. Polemik ini terulang lagi beberapa waktu lalu dalam perumusan UU Sistem Pendidikan Nasional, meskipun isunya sedikit beda. Isu yang muncul adalah, apakah peserta didik berhak untuk mendapatkan pelajaran agama sesuai agamanya, terutama peserta didik yang sekolah di lembaga keagamaan yang tidak sama dengan agamanya? Polemik selesai, dengan diakomodasikannya hak tersebut. Isu berikutnya, apakah guru pengajar mata pelajaran agama harus sesuai dengan agama yang diajarkannya, atau tidak harus?

Debat sekuler atau agama kira-kira mirip dengan debat yang sudah-sudah. Namun demikian, karena isu ini sering kali muncul, timbul tenggelam, dengan konteks politik yang kadang tidak menguntungkan debat ilmiah, maka menjadi penting dituntaskan, atau paling tidak dieksplorasi untuk menemukan *insight* lain. Namun, agar titik pijaknya jelas, perlu diperjelas dahulu terminologi *sekuler dan islami* ini. Apa yang dimaksud dengan sekuler? Apa yang dimaksud dengan islami?

Memahami Kembali sekuler(isme)

Sekularisme berbeda dengan ateisme. Banyak sekularis yang teistik, religius. Sekularisme, meskipun memiliki akar filsafat dalam tradisi Filsafat Yunan kuno seperti Epicurus, awalnya memiliki basis sosiologis di masyarakat Barat, terutama abad pertengahan, atau abad kegelapan. Lahirnya abad pencerahan, yang mereformasi abad pertengahan, melahirkan arus rasionalisme, industrialisme, dan nantinya negara-bangsa. Pendek kata, sekularisme terkait erat dengan arus yang mencoba menegakkan rasionalitas atas teks agama (Kristen, saat itu), individualisme atas komunalisme, dan negara sekuler (yang terpisah dari) atas agama.

Dalam Polemik Kebudayaan, salah satunya, diperdebatkan paradigma pendidikan Indonesia: mengacu ke Barat seperti diusung STA ataukah berpijak pada model pendidikan pesantren seperti dilontarkan Ki Hadjar Dewantara.

Webster Dictionary mendefinisikan sekularisme sebagai, *"a system of doctrines and practices that rejects any form of religious faith and worship"* (Seperangkat sistem doktrin keyakinan dan praktik yang menolak berbagai bentuk kepercayaan dan peribadatan keagamaan). Ensiklopedia Britanica, Americana, dan kamus standar lainnya seperti Oxford, memiliki benang merah yang sama: menolak hal-hal bersifat agama, *ruhaniah*, memisahkan prinsip agama dan hal-hal duniawi (kenegaraan, sosial). Prof Naquib Al-Attas, penggagas Islamisasi Ilmu, menyebut tiga ciri khas sekularisme: ***disenchanment of nature*** yaitu menghilangkan atau melepaskan kaitan alam semesta dengan dunia metafisik, dengan sang Pencipta; ***desacralization of politics,*** yaitu desakralisasi politik, agama dibatasi pada lingkungan privat, sedangkan masalah sosial politik dilepaskan dari nilai-nilai agama, dan; ***deconsecration of value,*** nilai-nilai agama direlatifkan, dihapuskan, atau cukup menjadi keyakinan privat.

Makna Islami

Sampai saat ini belum ada definisi tunggal dan final yang disepakati tentang makna islami. Masyarakat akan sepakat pada makna bahasa, yakni *sesuatu yang bersifat islami*. Jika dilanjutkan, makna secara istilah dari *yang islami*, atau *substansi yang islami*, maka kita akan mendapatkan banyak pendapat, perspektif, bahkan paradigma, yang beragam. Jika mengacu ke pesantren, maka islami tentu akan mengacu ke konsep pendidikan *ala pesantren*. Ini berarti menyangkut konsep dasar *tarbiyyah, ta'lim, ta'dib*, bahkan hingga *tast-qif* (*masdar staqqofa*), taksonomi ilmu, hierarki ilmu, adab niat mencari ilmu, adab pendidik, adab peserta didik, hingga adab terhadap literatur dan institusi pendidikan. Pendek kata, pendidikan ala pesantren merupakan pendidikan yang ideologis, tidak bebas nilai, berpijak pada nilai-nilai keislaman yang kental. Ketidakbebasan nilai dalam pendidikan agama Islam ini bisa dikatakan disepakati para pemikir dan praktisi pendidikan agama Islam lainnya, hanya saja titik tekannya berbeda-beda.

Jika sekilas membandingkan definisi operasional sekularisme dan islami ala pesantren, maka di level paradigmatik, mustahil pendidikan agama Islam berpijak pada paradigma sekuler. Namun demikian, persoalannya tidak sesederhana itu. Sebab ketika menyebut pendidikan agama Islam, maka di dalamnya bukan berarti hanya berkaitan dengan materi-materi keislaman. Pun, dalam materi keislaman juga bukan sekedar materi-materi *dogmatic* yang lepas dari rasio, *tafakkur*, atau hal empiria. Imam Ghazali dalam *Ar-Risalah Al-Ladduniyyah* membagi ilmu menjadi dua, yakni ilmu-ilmu *syar'iyyah* dan ilmu-ilmu *aqliyyah*. Menariknya, beliau menyebut ilmu-ilmu

syar'iyyah dengan redaksi *aktsaruha aqliyyatun nginda* '**alimiha**, dan menyebut ilmu-ilmu *aqliyyah* dengan *wa-akstaruha syar'iyyatun nginda* **'arifiha.** Dalam kitab *al-mustashfa*, beliau menggunakan redaksi *diniyyah* dan *aqliyyah*. Artinya, dikotomi antara sekuler dan islami, dalam tradisi filsafat ilmu dan pendidikan pesantren, sesungguhnya mengalami kebuntuan konseptual dan operasional.

pendidikan agama Islam, bukan sekedar multidispliner atau interdisipliner. Secara objek material, pendidikan agama Islam juga mencakup ajaran Islam dan realitas fisik-sosial, pendidikan non-agama juga mencakup agama sebagai objek kajian. Bedanya hanya di metodologi. Karenanya, bertukar metodologi, saling meminjam, kajian kolaboratif menjadi sebuah keniscayaan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

sekularisme terkait erat dengan arus yang mencoba menegakkan rasionalitas atas teks agama (Kristen, saat itu), individualisme atas komunalisme, dan negara sekuler (yang terpisah dari) atas agama.

Jalan Ketiga: Islami sekaligus Sekular?

Jelas, bahwa dikotomi vis-a-vis tersebut akan mengalami kebuntuan. Sebab materi pendidikan agama Islam bukan hanya aspek dogmatic yang menuntut *taken for gratend*, keimanan *tanpa reserve* untuk menerimanya, namun juga mencakup area rasional dan empiris, yang membutuhkan penalaran dan eksperimentasi lapangan, yang oleh *nash* sendiri diakui validitasnya.

Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah bagaimana meletakkan konsep islami dan sekuler pada proporsinya. Islami dapat diletakkan dalam area nilai-nilai, keyakinan, dogma, doktrin, *islamic teaching* tertentu, sedangkan sekularisme dapat dikontesktualisasikan sebagai kedaulatan rasio/akal dan dalil empiris dalam memahami realitas kealaman. Jika menggunakan konsep Cak Nur, sekularisme berarti meletakkan hal yang *profan* sebagai *profan*, yang dunia sebagai hal dunia, dan meletakkan hal yang transendental / imanen sebagai transendental, yang ukhrowi sebagai ukhrowi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah *pendekatan transdisipliner* dalam

Sebagai contoh sederhana, misalnya, ketika menjelaskan fenomena isra' mi'raj atau puasa, maka dibutuhkan kolaborasi pendekatan teks dan sains (antronomi, medis), di mana keduanya memiliki semacam kesamaan objek bahasan. Ketika menjelaskan konsep berkah, maka dibutuhkan penghampiran konsep berkah secara *ta'abbudi* sekaligus *saintifikasi berkah* dalam berbagai disiplin ilmu. Atau dalam fenomena mutakhir, kajian tentang Covid-19 jelas membutuhkan pendekatan transdisipliner. Pendekatan yang monodisipliner atau bahkan multidisipliner hanya akan menghasilkan *tashowwur* terbatas mengenai dimensi-dimensi Covid-19 yang kompleks. Dari sini semakin jelas bahwa pendidikan agama Islam membutuhkan pendekatan sekuler sekaligus islami.

Penutup

Mazhab teori kritis habermasian membagi taknosomi ilmu menjadi tiga. *Pertama*, ilmu-ilmu sainteks untuk menjelaskan fenomena fisikal alam. *Kedua*, ilmu-ilmu interpretatif atau fenomenologis untuk memberikan *pemaknaan* terhadap aspek fisik alam semesta, sejarah, atau peristiwa. *Ketiga*, ilmu-ilmu kritis untuk membebaskan manusia dari belenggu dominasi dan hegemoni. Positivisme (sekuler) akan berhenti pada dataran pertama, yakni memahami secara rasional fenomena kealaman, menolak hal-hal yang dianggap tidak rasional, tidak ilmiah, tidak dapat dibuktikan secara sains. Aspek pandangan agama yang metafisik akan dianggap pseudo-sains atau dalam Bahasa filsafat analitik, *unhappy speech*. Konsep hari pembalasan, misalnya, dipandang sebagai *ungkapan tidak bermakna*, sebab tidak dapat dibuktikan kebenaran atau kesalahannya.

Pendidikan agama Islam menolak paradigma tersebut, namun bukan berarti menolak penjelasan sainstek dari tradisi positivisme. Pendidikan agama tetap mengharuskan menjadikan temuan sains sebagai salah pijakan dalam melakukan tafsir terhadap teks dan realitas, sekaligus memberikan semacam *isyarah sains* kepada para saintis sebagaimana banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, untuk diteliti lebih lanjut. Setelah menerima data dan fakta sains tersebut, itu pendidikan agama memberikan nilai aksiologis atau etis dalam rumusan *learning outcomes* dan *impacts* dari pendidikan. Pendidikan agama Islam, dengan demikian, juga mesti diletakkan dalam kerangka "ilmu yang bermanfaat," yang dalam bahasa ilmu sosial searti dengan ilmu yang transformatif, ilmu yang mampu menggerakkan realitas sosial. Begitulah, kira-kira salah satu bentuk relasi antara agama dan sains dalam pendidikan agama Islam.

Implikasi dari konsep tersebut adalah bahwa aktivitas pembelajaran dan program pendidikan harus mengintegrasikan aspek-aspek non-kognitif seperti religiusitas, nilai-nilai akhlak, kreativitas, kemandirian, dan aspek-aspek rasional dan empiris dari pendidikan agama secara seimbang. Bekal kemampuan yang tidak berat-kognitif (*cognitive-heavy*) ini diharapkan akan membantu anak didik tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Program pendidikan yang melulu menekankan aspek kognitif, kecerdasan intelektual, dan kemampuan saintifik, dalam kasus Amerika (Essa & Young, 2003), telah terbukti melahirkan generasi yang individualistis, apatis, dan berkemampuan sosial rendah. Kelahiran generasi dengan tiga atribut ini lebih dari cukup untuk meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara—bahkan bila bangsa tersebut memiliki sebuah negara adidaya sekalipun. Tentu amat disayangkan bila atribut-atribut semacam ini yang justru menjadi dampak sebuah sistem pendidikan nasional. Karena secara filosofis pendidikan dipercaya merupakan piranti untuk, dalam rumusan Jacques Rousseau (Spring, 2004: 4), "memberikan identitas nasional" dalam diri generasi muda. Sementara pendidikan agama yang melepaskan diri dari aspek rasionalitas dan realitas empiris akan terjebak dalam keberagamaan yang statis, dogmatik, tidak kritis, menjadi legitimasi kekuasaan, bahkan bisa terjatuh dalam ekstrem radikalisme dan sekularisme ideologis.

Berada dalam kondisi kontradiktif antara idealisme keluhuran budi dalam pendidikan islami di satu sisi dan pemisahan agama dan dunia yang melahirkan krisis nilai di sisi lain tidaklah menguntungkan baik bagi pendidik, peserta didik, masyarakat, maupun bangsa ini. *Wallohu a'lam bis showwab.*

Gagasan

Menjadi Guru Ideologis

Marbawi

Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI)

Ali Fauzi (adik Ali Imron, Amrozi,dan Mukhlas pelaku Bom Bali) dan Sofyan Tsauri adalah mantan teroris yang telah kembali, bertaubat dan insaf. Ali Fauzi dan Sofyan Tsauri, pernah bercerita kepada penulis. Mereka berdua hanya memerlukan satu jam untuk menjadikan seseorang untuk siap menjadi "penganten". Sebutan bagi orang yang siap mengorbankan diri menjadi bomber yang mengorbankan orang-orang tak bersalah.

Saya kemudian berpikir, "ko bisa ya, mereka mengubah cara berpikir orang dalam waktu singkat? Sementara saya sebagai guru, bertahun-tahun *ngajar* dan menghadapi anak-anak yang sama, tak satu pun nasehat yang mereka ingat." Bahkan, nasehat (baca pengaruh) dari *peer group* yang lebih diikuti anak-anak, lebih manjur dibanding nasehat guru. Ko bisa?

Ternyata, setelah saya resapi, guru agama khususnya, tak pernah menjadi guru ideologis. Guru hanya menjadi pengajar yang sekedar mentransfer pengetahuan. Tak pernah menanamkan dengan kuat sebuah nilai yang dianut dan dipedomani. Sementara Ali Fauzi dan Sofyan Tsauri juga para jihadis kelompok teroris yang belum insaf atau yang sudah insaf, memiliki sebuah nilai yang dianut dan dipedomani. Nilai itulah yang kemudian menjadi ideologi. Ideologi yang menjadi doktrin, menjadi pandangan hidup. Kukuh kuat dipegang. Dan militant!

Nah kita atau maaf cukup saya saja sebagai contoh, guru tak pernah memiliki sebuah nilai yang menjadi ideologi. Sehingga ketika masuk ke kelas tak pernah menanamkan nilai yang menjadi keyakinan utama. Mengajar sekedar untuk menggugurkan kewajiban. "Ngajar" bukan sekedar soal menanamkan tauhid kepada anak didik. Namun lebih dari itu, nilai-nilai yang menjadi bagian penting untuk ditanamkan. Kita sebagai guru atau saya sebagai guru hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada anak didik. Tanpa memberi makna dan memaknai pengetahuan sebagai sebuah nilai apalagi sebagai sebuah ideologi.

Nilai yang dipedomani dan menjadi ideologi yang saya maksud adalah nilai-nilai Islam *Rahmatan lil Alamin* (Isra). Inilah kita atau lagi-lagi saya, yang sering lupa bahkan melupakan bahwa kita harus menanamkan nilai Islam *Rahmatan lil Alamin* sebagai sebuah ideologi. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi guru ideolog? Sehingga mampu menanamkan nilai dan mengubah cara berpikir anak didik kita untuk meyakini dan mempedomani nilai yang kita tanamkan.

Ada lima syarat agar kita bisa menjadi guru ideolog. Sekali saya tekankan, guru agama harus menjadi guru ideolog Isra. Yang *pertama*, guru agama harus menanamkan nilai setiap dirinya masuk ke kelas, secara kontinu atau *istiqomah*. Tanamkan nilai sekecil apa pun kepada anak didik kita ketika kita masuk kelas. Sebab anak didik kita mendapatkan banyak nilai dari media sosial yang justru nilai-nilai tersebut menjadi pedoman mereka. Tanamkan nilai-nilai Isra yang mengembangkan perilaku *tasamuh, I'tidal, muatthanah, musyawarah* dan nilai-nilai moderasi lainnya. Tanamkan itu, setiap kita masuk kelas.

Yang *kedua*, sebagai guru ideolog, kita harus menjadi teladan bagi anak didik. Menjadi *role model* buat mereka. *Role model* yang sanggup mewarnai dan diikuti oleh anak didik kita. Sebab seperti kita tahu, anak didik kita lebih banyak mengidolakan artis-artis Korea atau artis-arti yang digarap instan oleh televisi. Simulacra. Media sosial dan televisi menjadikan wahana untuk melahirkan idola-idola yang diteladani anak didik kita. Maka jadilah teladan untuk anak didik kita. Tentu teladan atau *uswah* yang kuat dan membekas pada jiwa anak didik kita.

Yang ketiga, guru agama harus memiliki *personal approach* yang baik. Guru agama harus memiliki model pendekatan kepada anak didik yang tepat, benar, dan memberikan penghormatan personal dan komunal yang mampu dirasakan anak didik. Inilah bedanya guru agama dengan yang lain. *Personal approach* yang dimaksud adalah cara berkomunikasi, cara berinteraksi, dan tak membedakan. Komunikasi dan interaksi yang menyejukkan dan memberi edukasi serta panutan bagi anak didik. Dalam bahasa sederhananya adalah memberikan perhatian kepada anak didik kita. Perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sentuh hati mereka dengan komunikasi yang sejuk dan santun. Inilah kekuatan dari guru ideolog. Komunikasi yang menyentuh hati dan kemudian mampu mengubah cara berpikir anak didik.

Yang keempat, sebagai guru ideolog, guru agama harus mendoakan anak didiknya. Inilah yang membedakan guru agama dengan yang lain. MENDOAKAN! Inilah yang menjadi kekuatan guru agama. Doa adalah senjatanya orang muslim. Doakan anak didik kita bagaimanapun kondisi anak didik kita, tanpa membedakan. Sebab mereka akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Doakan anak didik kita.

Yang kelima, syarat menjadi guru ideolog adalah IKHLAS. Sebagai guru agama, mengerjakan kewajiban sebagai guru ideolog yang menanamkan nilai, yang menjadi teladan, yang memperhatikan anak didik dan mendoakannya, harus ditutup dengan keikhlasan. Ikhlas adalah kunci dari semua ikhtiar yang kita lakukan.

Pertanyaan kedua, sebagai guru agama yang ideolog apa yang menjadi tanggung jawabnya?

Sebagai guru agama, kita memiliki minimal enam kewajiban untuk menanamkan tanggung jawab dalam mendidik anak didik kita. Yang pertama, menanamkan kepada anak didik kita tanggung jawab kepada Allah. Ini menjadi dasar utama dan pertama kita sebagai pendidik, menanamkan tauhid-spiritual. Tanamkanlah kepada anak didik kita bahwa mereka memiliki tanggung jawab kepada Allah. Di mana mereka memiliki keterikatan lahir batin hingga ajal menjemput. Yaitu mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan kepada Allah. Sehingga motivasi hidup mereka selalu memiliki dasar spiritual-teosentris.

Yang kedua menanamkan kepada anak didik kita tanggung jawab kepada diri sendiri. Ini berkaitan mendorong anak untuk bersikap mandiri dan memiliki sikap dewasa. Tanggung jawab kepada diri sendiri juga berkaitan dengan kemampuan menimbang segala konsekuensi yang mereka akan hadapi dari apa yang mereka kerjakan. Termasuk guru harus mengembangkan potensi anak didik dari sisi kecerdasan, naluriah, indrawi, agama dan ilahiyahnya.

Yang ketiga, menanamkan kepada anak didik kita tanggung jawab kepada orang tua dan masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana anak didik kita memiliki kesalehan sosial sebagai manifestasi dari kesalehan spiritual yang tercermin dalam tindakan sosial. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.

Ternyata, setelah saya resapi, guru agama khususnya, tak pernah menjadi guru ideologis. Guru hanya menjadi pengajar yang sekedar mentransfer pengetahuan. Tak pernah menanamkan dengan kuat sebuah nilai yang dianut dan dipedomani.

Yang keempat, menanamkan kepada anak didik kita tanggung jawab kepada lingkungan. Ini berkaitan dengan bagaimana *mindset* anak didik kita untuk memelihara, menjaga dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Memiliki kepekaan terhadap persoalan lingkungan sehingga tidak memiliki sifat dan sikap serakah untuk mengeksplorasi lingkungan demi kepentingan sendiri.

Kelima, menanamkan kepada anak didik kita tanggung jawab menegakkan keadilan. Ini berkaitan dengan agar anak didik kita kritis terhadap persoalan yang mereka hadapi yang bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan, keadilan, toleransi, kearifan lokal dan demokrasi.

Keenam, menanamkan kepada anak didik kita tanggung jawab untuk mencintai tanah air. Penting Pendidikan menanamkan cinta tanah air. Sebab hal tersebut menjadi bagian penting untuk kelangsungan sebuah sejarah bangsa dan kemajuan bangsa. Termasuk di dalamnya adalah menanamkan ideologi negara Pancasila.

‘

“Ngajar” bukan sekedar soal menanamkan tauhid kepada anak didik. Namun lebih dari itu, nilai-nilai yang menjadi bagian penting untuk ditanamkan.
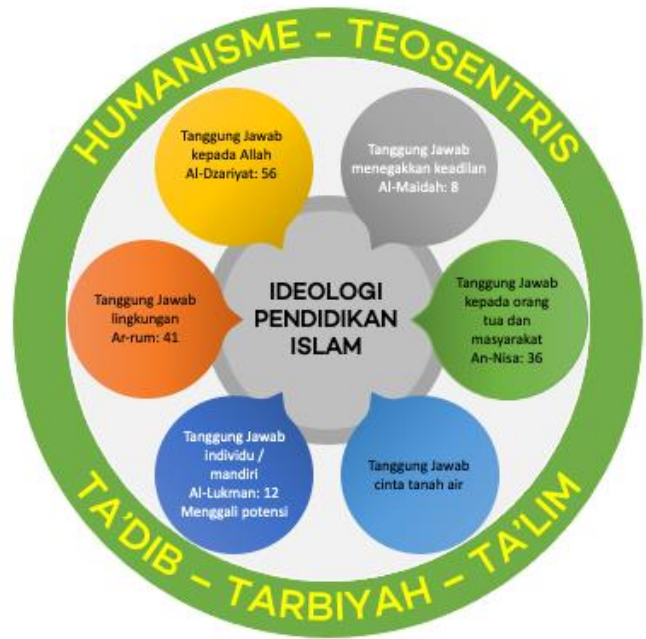
Inilah tujuan dari ideologi Pendidikan Islam, adalah melahirkan manusia yang memiliki humanisme teosentris dengan metodologi *ta'dib*, *ta'lim*, dan *tarbiyah*. Pendidikan yang mengacu kepada humanisme teosentris adalah Pendidikan yang ingin melahirkan generasi yang memiliki kepekaan sosial, lingkungan dan kuat dalam nilai-nilai universal namun memiliki sandaran teologis tauhid.

Sebagai penutup, penulis ingin kembali menekankan kepada sahabat pendidik, mari jadilah guru yang ideologis. Bukan sekedar guru yang cuma mengajar Pendidikan Agama Islam. Tapi guru yang betul-betul menguatkan nilai-nilai ISRA dan menanamkan enam tanggung jawab seperti di atas. Jadilah guru yang ideologis yang mengasah kepekaan spiritual, sosial, lingkungan, dan kepekaan kepada bangsa.

Gagasan

Ramadan Menguatkan Karakter Kemanusiaan

Oleh: Muhammadun

Pengajar Asrama Santri Bil Qolam, Yogyakarta).

Merasakan Ramadan adalah kenikmatan yang luar biasa. Ramadan menghadirkan pengalaman spiritual yang unik, khas, dan mengesankan. Keistimewaan ini tak lain karena Ramadan adalah madrasah yang disiapkan Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad. Kurikulumnya langsung didesain oleh Allah. Makanya, ketika merayakan Idulfitri, semua merasakan bahagia yang selalu membekas di hati.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa” (QS. Al Baqarah: 183). Ayat al-Qur’an ini menjadi bukti keistimewaan puasa Ramadan sebagai madrasah yang langsung diciptakan Allah. Ini menjadi sangat jelas ketika dalam hadis Qudsi ditegaskan, “Setiap amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.” (HR Bukhori dan Muslim).

Hadis Qudsi tersebut menegaskan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, karena langsung mendapatkan perhatian khusus Allah SWT. Makanya, setiap manusia punya pengalaman tersendiri dengan puasanya yang menjadikannya terus bahagia tidak makan dan tidak minum. Bahagia dalam kondisi puasa inilah titik permulaan lahirnya karakter manusia yang bervisi takwa.

Ramadan menjadi momentum sangat istimewa untuk menemukan dan menguatkan karakter kemanusiaan. Kajian tasawuf membagi dua unsur dalam diri manusia. Pertama, unsur *nasut* (kemanusiaan) dan kedua, unsur *lahut* (ketuhanan).

Unsur lahut merupakan sifat-sifat yang baik (*immaterial*), seperti kesucian, keabadian, kedamaian, kebaikan, ikhlas, menghargai, empati, jujur, dan lain-lain. Sementara unsur nasut merupakan sifat-sifat materialistik-hedonistik yang melekat pada manusia, seperti sikap hidup hedonis, berorientasi pada materi, pamrih, permusuhan, adu-domba, ketegangan sosial, dan lain-lain.

Dengan puasa, sesungguhnya kita mem-*fana*-kan unsur *nasut*, dan dalam waktu bersamaan mem-*baqa*-kan unsur *lahut*. Puasa itu meminimalisasi bahkan menghilangkan sikap hedonistik-

materialistik, adu domba, caci maki, ujaran kebencian dan lan-lain dan dalam waktu bersamaan mengaktifkan orientasi yang bersifat keabadian, kebaikan, kedamaian, kejujuran, kelemahlembutan, empati, menghargai orang lain, dan lain-lain. Jika sifat-sifat Tuhan atau unsur-unsur *lahut* yang terbiasa di dalam diri kita maka potensi kita untuk semakin dekat dengan Allah SWT semakin tinggi.

Dari sini, hadis Qudsi "Ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya" menguatkan hikmah puasa dalam meneguhkan karakter manusia yang selalu dekat dengan Allah sekaligus selalu menyapa kebahagiaan dengan sesamanya. Ketika nilai-nilai buruk sirna dengan spirit puasa, maka manusia menjadi sosok bersinar yang selalu peduli dengan kebahagiaan dan kedamaian sesamanya.

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad). Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Inilah indahnya ajaran Islam. Memberi makan untuk orang yang sedang berbuka puasa punya pahala yang sama dengan orang yang puasa. Inilah fondasi nilai kepeduliaan yang ditancapkan dalam ibadah puasa. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, di situlah kita diajari untuk merasakan lapar dan dahaga orang lain. Kalau kita bisa merasakan, maka jangan

Ramadan menjadi momentum sangat istimewa untuk menemukan dan menguatkan karakter kemanusiaan. Kajian tasawuf membagi dua unsur dalam diri manusia. Pertama, unsur *nasut* (kemanusiaan) dan kedua, unsur *lahut* (ketuhanan).

Selalu Peduli dan Setia Mendistribusikan Kebahagiaan

Madrasah bernama puasa Ramadan ini menghadirkan gelar bernama *muttaqin* (orang-orang yang bertakwa). Tentu saja, gelar ini sifatnya abstrak, sulit dipahami secara kasat mata. Tapi dari sekian banyaknya nilai dalam puasa, setidaknya ada dua hal yang sangat bermakna bagi sesama. Yakni selalu peduli dan setia mendistribusikan kebahagiaan. Dua hal ini sebenarnya tercermin dari dalam diri Nabi Muhammad SAW.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

pernah lali untuk peduli dengan sesama. Tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak punya apa pun untuk sedekah, setidaknya bisa sedekah dengan senyuman. Karena senyum kepada sesama itu juga sedekah.

Dalam keterangan lain, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Anas bin Malik, bahwa saat keluar untuk menjalankan shalat id, Nabi bertemu dengan seorang anak yatim yang sedang menangis melihat teman-teman sebayanya bermain, yang ternyata anak itu sudah kehilangan ayahnya karena mengikuti perang bersama Rasulullah. Anak itu akhirnya bahagia karena mendapatkan pakaian indah dari Rasulullah dan diakui sebagai anak oleh Rasulullah.

Kaitan dengan anak yatim ini, Nabi Muhammad juga menegaskan.

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هكَذَا

وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً

Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini", kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta agak merenggangkan keduanya (HR Bukhari).

Perhatian Nabi Muhammad terhadap anak yatim menjadi *alarm* sangat penting bagi umat Islam saat merayakan hari raya. Jangan sampai anak yatim (dan mereka yang lemah) kehilangan kebahagiaan. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kebahagiaan jangan pernah dinikmati sendiri, tapi harus didistribusikan kepada siapa saja, khususnya kepada anak yatim dan kaum lemah terpinggirkan.

Dari sini, karakter orang puasa tak lain adalah karakter yang selalu peduli dan setia mendistribusikan kebahagiaan kepada siapa saja, khususnya mereka yang lemah dan terpinggirkan. Ciri utama orang yang bertakwa, selain teguh *istiqomah* ibadahnya, tentu saja tak pernah lalai untuk peduli dengan sesamanya.

Kefitrian untuk Indonesia Damai

Ketika merayakan Idulfitri, umat Islam bukanlah mereka yang pamer sukses dan kekayaan. Tapi mereka yang menguatkan kefitriannya untuk peduli dan penuh kasih sayang kepada sesama. Inilah fondasi paling utama perdamaian. Peduli dan menebarkan kebahagiaan menjadi pintu utama umat Islam untuk tampil sebagai *rahmatan lil'alamin*.

Menurut KH Said Aqil Siraj (2015), kefitrian mengetuk kesadaran kita untuk terus berusaha menjernihkan pikiran, membeningkan hati dan mengokohkan fondasi spiritual. Idul Fitri tak sekedar bermakna mengkhatamkan puasa, akan tetapi kristalisasi nilai-nilai spiritual yang kita jernihkan saat Ramadhan. Nilai-nilai spiritual inilah yang akan menjadi penggerak pikiran dan penuntun langkah kita untuk berbuat baik sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi.

Perhatian Nabi Muhammad terhadap anak yatim menjadi *alarm* sangat penting bagi umat Islam saat merayakan hari raya. Jangan sampai anak yatim (dan mereka yang lemah) kehilangan kebahagiaan. Ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kebahagiaan jangan pernah dinikmati sendiri, tapi harus didistribusikan kepada siapa saja, khususnya kepada anak yatim dan kaum lemah terpinggirkan.

Menjernihkan hati adalah target utama nilai keislaman yang tercermin dalam risalah Muhammad, yakni penyempurnaan akhlak (*liutammima makaarimal akhlaq*). Hati juga

menjadi alat pemancar gelombang-gelombang kebaikan maupun menerima sinyal-sinyal yang tepat untuk berbuat baik. Orang yang baik akan dipertemukan dengan sesama orang baik, karena dilandasi kebaikan dan keikhlasan yang terpancar dari hatinya. Hati (*qalb*) mengandung lima pengertian. Pertama, hati berfungsi sebagai *bashirah*, yaitu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Setiap orang memiliki fitrah kemampuan membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Kedua, hati berfungsi sebagai *dhamir* atau moral, yaitu yang memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan. Ketiga, hati sebagai *fuad*, yaitu sebagai hakim yang menentukan apakah perbuatannya baik atau buruk. Keempat, hati sebagai *sirr*, yaitu penyingkap rahasia. Kelima, hati sebagai *lathifah*, yaitu kelembutan batin yang mampu mengakses langsung Lauh Mahfudz.

Untuk memiliki hati yang lembut dan bersih seperti itu, perlu proses penyucian diri (*tazkiyatu an-nafs*) secara konsisten. Puasa adalah media sangat bagus dalam penyucian diri itu. Dengan puasa itulah, hati yang lembut dan bersih menggapai kefitriannya. Dengan hati yang penuh kefitrian, lahirlah manusia-manusia yang peduli dan mau berbagi kebahagiaan dengan sesama.

Kefitrian membentuk hati manusia jadi bersih, suci, seperti saat baru lahir dari ibunya. Kesucian dan kebeningan hati inilah titik awal gerakan untuk membersihkan bangsa ini dari radikalisme dan terorisme. Berbagai agenda politik dan kebangsaan dalam rangka deradikalisasi harus terus dilakukan, tetapi laku hati yang jernih nan suci menjadi pangkal utama berbagai agenda itu bisa sukses di masa depan.

Kefitrian membentuk hati manusia jadi bersih, suci, seperti saat baru lahir dari ibunya. Kesucian dan kebeningan hati inilah titik awal gerakan untuk membersihkan bangsa ini dari radikalisme dan terorisme.

Hikmah

Islam Memotivasi Umatnya Untuk Selalu Belajar, Ini Tujuannya

Moh Afif Sholeh, M.Ag

Mencari ilmu atau *Talabul Ilmi* merupakan perintah agama. Hal ini bertujuan agar manusia selalu *update* sesuai waktu yang dihadapi karena setiap manusia hidup di zaman yang berbeda dengan orang sebelumnya. Setiap muslim harus memetakan ilmu yang wajib diketahui terlebih dahulu yaitu urusan akidah, ibadah dan cara berakhlak yang baik kepada Allah dan makhluk-Nya.

Belajar tak harus di sekolah, madrasah atau kampus atau al-jamiah tetapi di manapun ia berada bisa belajar tentang kehidupan terutama dari alam sekitar. Ilmu agama sebagai penuntun langkah manusia agar tak salah arah dan tujuan, begitu juga ilmu pendukung yang lain sebagai pelengkapnya. Keduanya saling melengkapi dan saling mengisi.

Abu Naim al-Asfihani dalam kitab *Hilyat Al-Aulia* mengutip perkataan Abu Darda' yang berbunyi:

عن أبي الدرداء، رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا قبل أن يرفع العلم، إن رفع العلم ذهاب العلماء، إن العالم والمتعلم في الأجر سواء، وإنما الناس رجلان: عالم، ومتعلم، ولا خير فيما بين ذلك "

Dari Abi Darda' RA berkata:"Belajarlah kalian sebelum ilmu diangkat, Sesungguhnya ilmu akan hilang dengan meninggalnya para ulama'. Dan sesungguhnya orang yang mengajar dan belajar sama-sama mendapatkan pahala. Manusia ada dua kategori yaitu orang yang alim dan orang yang mencari ilmu (belajar). Dan tak ada kebaikan yang sempurna selain di antara mereka.

Lebih lanjut Abi Darda' mengatakan bahwa seseorang tak akan mencapai tingkatan ketakwaan bila ia tak mengetahui ilmunya dan akan lebih sempurna bila mampu mengamalkannya.

Seseorang akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat bila ia memiliki ilmu dan menggunakan dengan baik karena pada prinsipnya ilmu tak akan menghasilkan buahnya bila hanya sekedar dibuat retorika belaka. Orang yang selalu belajar akan menjadi terpelajar serta diharapkan dirinya tak menjadi manusia yang kurang ajar.

Belajar Agama tapi tak Mendapatkan Hidayah, Ini Pertanda Apa?

Belajar merupakan kewajiban setiap manusia terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewajibannya seperti ilmu untuk mengenal Tuhannya atau bisa disebut ilmu tauhid, juga ilmu yang menyangkut tata cara ibadah dan muamalah yang baik yaitu ilmu fiqih dan ilmu akhlak atau etika diri terhadap diri sendiri dan orang lain yaitu ilmu akhlak atau tasawuf.

Ilmu yang bermanfaat adalah yang mampu diaplikasikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehingga menambah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sehingga mampu mengubah dirinya dari kehinaan menuju kemuliaan, dari segala keburukan menjadi kebaikan, dari kedangkalan menjadi keterbukaan, dari sifat jahil menjadi seorang yang arif. Peranan ilmu akan menuntun seseorang agar mendapatkan hidayah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Bidayatul Hidayah*

الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية، وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها

Hidayah merupakan buah dari ilmu. Ada Permulaan dan akhiran, ada lahir dan batin. Dan tak akan mencapai puncaknya sebelum ada penguatan dalam permulaannya juga tak akan mencapai lubuk batinnya sebelum menguatkan lahirnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ilmu yang bermanfaat selalu mengarahkan manusia untuk mendapatkan petunjuk *(hidayah),* bertambah kebaikannya, serta menerima kebenaran dan tak mudah menyalahkan orang lain.

Semakin tinggi ilmu seseorang menjadikan dirinya seolah makhluk kecil yang tak mempunyai daya kekuatan apa pun, ia sadar akan kebesaran pencipta-Nya yang Maha Besar, Maha Mulia. Ini diibaratkan seperti minum air laut, bila ia meneguknya ia akan selalu merasa kehausan. Untuk itu, agar ilmu yang diperoleh bermanfaat harus diamalkan *step by step*, dan sebatas kemampuan dirinya sehingga tak sia-sia umur dan waktunya.

6 Alasan Orang Mukmin harus selalu Belajar

Tak ada satu pun manusia yang terlahir ke dunia dalam keadaan pintar, mengetahui banyak hal, tetapi melalui proses yang harus dilalui secara bertahap dan berjenjang sehingga ia menjadi seorang pembelajar.

Islam sebagai agama selalu memotivasi kepada umatnya agar selalu belajar terutama yang wajib dipelajari lebih dulu yaitu ilmu tentang masalah ketuhanan (tauhid), ilmu tentang urusan ibadah dan muamalah (fiqih), juga ilmu tentang akhlak.

Imam Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* menuturkan tentang enam hal yang menjadi motivasi seorang mukmin untuk selalu menuntut ilmu.

أحدها: أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على أدائها إلا بالعلم.

Pertama, seorang mukmin berpendapat bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk melakukan segala kewajiban, sedangkan aku tak mampu mengerjakannya kecuali bila mempunyai ilmunya.

الثانية: أن يقول نهاني عن المعاصي وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم.

Kedua, Allah melarangku bermaksiat sedangkan diriku tak mampu menjauhinya kecuali dengan ilmu.

الثالثة: أنه تعالى أوجب علي شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم.

Ketiga, Allah mewajibkan kepadaku untuk bersyukur atas nikmatnya namun aku tak mampu memenuhinya kecuali dengan ilmu.

والرابعة: أمرني بإنصاف الخلق وأنا لا أقدر أن أنصفهم إلا بالعلم.

Keempat, Allah memerintahkanku untuk memaafkan orang lain padahal diriku tak mampu bila tak memiliki ilmunya.

والخامسة: أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم

Kelima, Sesungguhnya Allah memerintahkankan kepadaku untuk bersabar atas ujian yang telah diberikan sedangkan diriku tak mampu bila tak memiliki ilmu.

والسادسة: أن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم

Keenam, Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku agar melawan sebagai sedangkan diriku tak mampu melawannya kecuali dengan ilmu.

Dari penjelasan ini, seorang yang berilmu akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat serta mampu mengatasi segala masalah yang ia hadapi. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, ilmu merupakan imamnya amal, maksudnya amal seseorang akan diterima oleh Allah jika didasari dengan ilmu. Maka dari itu, seorang mukmin harus selalu belajar agar tak ketinggalan dalam berbagai hal serta selalu menjadi orang yang terdepan.

Istilah

Sekularisme, Akhlak, Kebangsan dan Madani

Oleh: Khoirul Anwar Afa

SEKULARISME

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme diberi makna suatu paham atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak dimasukkan dalam urusan politik, negara, atau institusi publik. Makna tersebut hampir sama dengan sekularisme dalam bahasa Inggris, misalnya seperti yang tertuang dalam Cambridge Dictionary bahwa *sekularisme* adalah keyakinan bahwa agama tidak bercampur dalam konteks sosial dan aktivitas politik negara.

Di beberapa sumber menyebut kata sekularisme diambil dari bahasa latin, *saeculum*, yang berarti waktu tertentu atau tempat tertentu. Kemudian pemaknaan tersebut dikembangkan untuk menyebut kondisi sekarang dan di sini. Makna ini juga sealur dengan latar belakang munculnya istilah sekularisme.

Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kata sekularisme mulai digunakan seiring munculnya dogma-dogma gereja yang berusaha membentengi munculnya pembaharuan pemikiran dan sains. Secara radikal gereja membentengi diri dan bahkan tidak segan-segan memberi hukuman mati kepada siapa saja yang menentang ketentuan gereja, yaitu tidak boleh mencampur adukkan pembaruan pemikiran dan inovasi sains.

Kemudian muncul kelompok-kelompok yang menolak adanya dogma-dogma tersebut serta peraturan gereja yang mengekang. Dan mereka itulah yang menjadi pelopor terjadinya sekularisasi.

AKHLAK

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan yang juga diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Kata akhlak sendiri merupakan jamak taksir dari kata *khuluqun* yang secara etimologis mempunyai arti tabi'at (*al-sajiyyat*), watak (*al-thab*) budi pekerti, kebijaksanaan, agama (*ad-din*). Menurut para ahli, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran (secara spontan), pertimbangan, atau penelitian. Akhlak biasa disebut juga dengan dorongan jiwa manusia berupa perbuatan yang baik dan buruk.

Ada banyak pendapat yang mendefinisikan makna akhlak ini. Di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik ini membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda.

Dalam al-Qur'an kata akhlak terkadang disebutkan dengan bentuk *khuluq*, sebagaimana digunakan dalam surah al-Qalam ayat 4. Dalam ayat tersebut, menurut sebagian ulama, yang dimaksud adalah akhlak yang digunakan untuk menjaga relasi antara manusia dengan sang pencipta maupun dengan sesama manusia.

Dalam Hadits juga demikian. Seperti misalnya penggunaan kata akhlak dalam hadits yang sangat populer tentang visi kenabian bahwa. "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk penyempurnaan kemuliaan akhlak." Juga pernah disebut dengan menggunakan bentuk tunggalnya, seperti yang terdapat dalam hadits, "Surga paling atus dibangun untuk siapa saja yang akhlaknya bagus (*Liman ahsana khuluquhu*)."

Dalam kitab-kitab berbahasa Arab, diskursus tentang tema akhlak ini sangat banyak sekali. Khususnya dalam kitab-kitab yang bergenre akhlak dan tasawuf, begitu juga dibahas dalam kitab Fiqih.

KEBANGSAAN

Secara bahasa, kata "kebangsaan" ini merupakan gabungan dari kata "bangsa" dan mendapat imbuhan awalan "ke" dan "an". Dalam kaidah bahasa Indonesia, imbuhan tersebut memiliki tiga fungsi dasar. Yaitu bisa berfungsi membentuk jadi kata kerja, kata benda dan kata sifat. Adapun kata bangsa sendiri dalam KBBI diberi makna kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.

Ada juga makna lain, yaitu golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal usul dan sifat khas yang sama. Atau diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi.

Kemudian jika sudah menjadi kebangsaan, maka paling tidak sering diberikan beberapa kategori. Pertama, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Kedua, perihal bangsa yang bertalian dengan bangsa. Ketiga, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian kebangsaan lebih pada sifat kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara terhadap diri dan lingkungannya.

Kebangsaan lebih menekankan pada penguatan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya tentu terdapat persatuan dan kesatuan kultural, baik dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Dari makna di atas, ada yang menyamakan antara kebangsaan dengan nasionalisme. Karena masing-masing memiliki makna sebagai sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah masyarakat dalam hal suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita. Semua itu tercipta demi meraih kehidupan yang rukun, damai, tenteram, dan tolong menolong.

Bahkan jika dirunut dalam sejarah, penggunaan kata kebangsaan ini sebagai respons atas sistem kehidupan yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia. Di antara yang direspons adalah terjadinya kolonisasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

MADANI

Kata madani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa makna. Di antaranya, berhubungan dengan hak-hak sipil, berhubungan dengan perkotaan, menjunjung tinggi nilai, norma, yang ditopang penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban. Namun, kata tersebut mulanya diadobsi dari bahasa Arab madaniyyin yang dinisbahkan pada kota Madinah, yang artinya bertanah air, bermasyarakat yang cinta tanah air, berperadaban, modern atau kebalikan dari premanisme.

Secara bahasa kata Madani dalam bahasa Arab dibangun dari kata *madana*, *mudunan* yang maknanya adalah mendiami. Kemudian jika menjadi *tamaddun* sering diartikan berperadaban atau berurbanisasi. Dalam bahasa Indonesia kata ini sering digunakan untuk menggagas konsep masyarakat modern dengan istilah *civil society*. Kata *Madani* yang sering dikorelasikan dengan kata Madinah itu dibangun dari huruf *mim, dal* dan *nun*. Kemudian kata tersebut mengikuti wazan kata mif'alah, hanya saja lalu ada yang berpendapat jika huruf mim dalam kata *madinah* itu hanya sebagai tambahan saja, sehingga kata dasarnya adalah diina yang bermakna dimiliki.

Jika demikian, itu artinya huruf mim yang ada pada kata tersebut bukanlah tambahan melainkan asli. Oleh sebab itu jika ada kalimat *madana al-Rajulu* (seseorang berurban) jika ia datang ke kota atau mendatangi kota. Sehingga jika diurai secara bangunan huruf, setiap kata yang dibangun dari huruf *mim, dal* dan *nun* itu bermakna benteng, yakni semua wilayah pasti dibangun benteng yang berada di tengah maupun lainnya, dan itu umumnya disebut sebagai madinah atau kota.

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan kata Madani, hanya saja bentuk derivasinya banyak sekali dimuat dalam Al-Qur'an. Seperti kata *Madain,* dan *Madinah,* yang menurut Kamus dari dua kata tersebut kalau dikategorisasikan secara makna, maka paling tidak memiliki beberapa makna. Di antaranya, bermakna kota Yatsrib, seperti yang disampaikan dalam surah at-Taubah ayat 101. Kemudian bermakna kota Mesir, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 18. Atau kata *Madain* yang bermakna desa atau suku, seperti yang terdapat dalam surah al-Syu'ara ayat 53.

Dalam Hadits, kata Madinah juga beberapa kali digunakan dalam menyebut kota Madinah. Seperti dalam hadits yang sangat terkenal, "Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah serta berdoa untuk keberkahannya, maka aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim serta berdoa untuk keberkahannya."

Adapun dalam kitab-kitab Arab, kata *mudun, madani*, ini sering menjadi pembahasan dalam tema politik dan kemasyarakatan. Bisa ditemukan dalam kitab-kitab Fiqih dan akhlak.